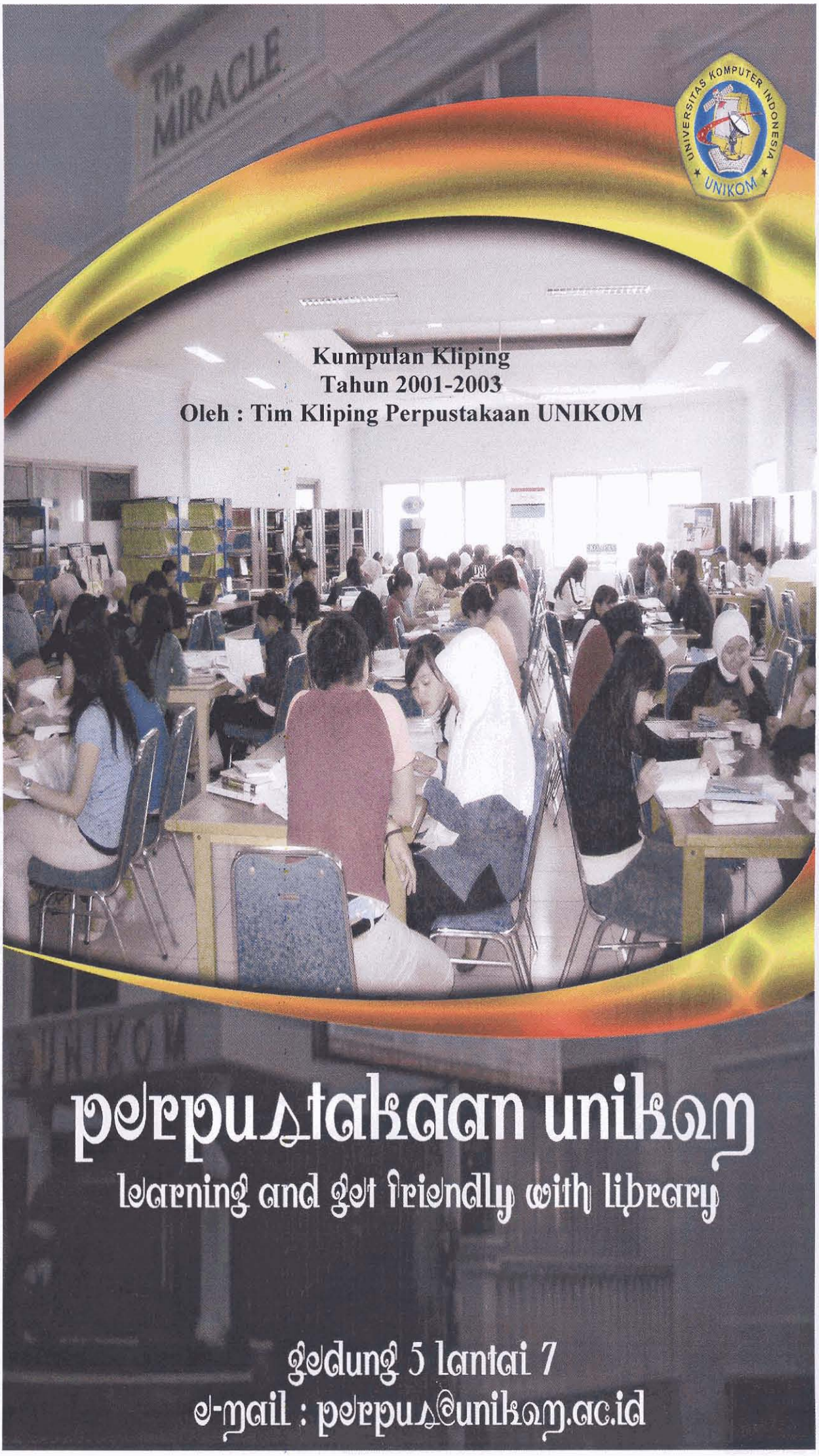

THE MIRACLE
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM
Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM
perpustakaan unikom
learning and get friendly with library
gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 14 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 15 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek /NO. CLASS : KRISIS EKONOMI / 330.9

Penyakit Institusi Membelit Indonesia dalam Krisis Berkepanjangan

KRISIS ekonomi secara umum dapat dilihat dengan penjelasan teoretis secara ekonomi kelembagaan (*Institutional Economics*). Bidang ini dipelajari dalam disiplin ilmu ekonomi politik di mana eksistensi kelembagaan (*institutions*) yang ada dapat memberi penjelasan terhadap mekanisme bekerjanya sistem ekonomi.

DENGAN mempelajari institusi, maka persoalan-persoalan kritis dapat dideteksi, sehingga kebijakan yang diambil lebih mendasar dan lebih mengarah pada akar persoalan.

Jika kelembagaan yang ada lemah dan atau bahkan tidak ada pembangunan kelembagaan yang memadai, maka dapat dipastikan kondisi ini berimplikasi terhadap kelemahan sistem ekonomi itu sendiri. Sebaliknya jika kelembagaan yang ada cukup kuat untuk mendukung sistem ekonomi, maka sistem ekonomi lebih kuat dan perkembangannya akan cukup prospektif. Dalam konteks ekonomi politik ini, institusi merupakan tulang punggung dari sistem.

Jadi kelemahan dan kekuatan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari kekuatan dan kelemahan institusi ekonomi yang mendukungnya.

Dalam hampir segala aspek, institusi ini terkait dengan proses politik atau kebijakan publik. Dengan demikian, ekonomi (fiskal, moneter, investasi, dan lain-lain) tidak dilihat dari sudut pandang ruang kosong, tetapi terkait dengan berbagai dimensi sosial dan politik.

Perbincangan tentang kelembagaan menjadi penting dalam sistem yang modern, karena beragam kepentingan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Dalam komunitas yang kecil dan sederhana, pengaturan bermasyarakat dapat disandarkan pada pemimpin dan norma-norma yang sederhana.

Akan tetapi, dalam masyarakat modern institusi yang berdiri di tengah berbagai kepentingan, sekaligus mengatur sistem dan mekanisme yang ada, merupakan unsur mutlak yang harus diinternalisasikan.

Begitu kehidupan masyarakat berkembang semakin maju, maka institusi masyarakat tidak bisa lagi dikembangkan dan dikelola secara sederhana. Institusi yang digantungkan pada orang-orang akan mempunyai daur hidup pendek dan membahayakan sistem secara keseluruhan.

Dari sisi pandang ekonomi kelembagaan ini, dapat dilihat akar masalah dari krisis yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi berlangsung cepat, tetapi tidak didukung oleh institusi yang modern dan kuat sehingga tergelincir ke dalam krisis sosial politik yang akut. Kesenjangan ekonomi menambah krisis dan kecemburuan sosial yang parah. Institusi pengambilan keputusan yang terindividualisasikan, menyebabkan sistem tidak transparan dan penuh penyimpangan.

Karena itu, pembangunan institusi yang memadai semakin diperlukan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Tanpa pembangunan institusi yang baik, maka Indonesia akan terus terjebak dari krisis ke krisis.

Persoalan di Amerika Latin juga terjebak ke dalam krisis institusi, di mana usaha demokratisasi sistem tidak berhasil karena bertabrakan dengan institusi usang, yang justru dipakai untuk mendukung sistem ekonomi dan politiknya.

Institusi di sini diartikan sebagai *aturan main* (*rule of the game*) dan bisa diartikan lebih luas sebagai organisasi. Aturan main sebagai pelengkap mutlak dari institusi pasar diperlukan dalam kehidupan kolektif. Secara teoretis institusi merupakan aturan di dari suatu sistem atau tata sosial politik atau ekonomi.

Jadi, suatu sistem sosial politik atau ekonomi dengan institusi yang lemah akan menghasilkan sistem yang lemah pula sehingga kesinambungannya menjadi pertanyaan krusial. Lebih jauh, sistem yang berjalan tanpa institusi yang memadai akan menyebabkan kelambanan dalam mentransformasikan sistem tersebut menjadi lebih berkembang maju dan modern.

Persoalan institusi adalah faktor yang fundamental dalam kehidupan sosial politik maupun ekonomi. Institusi di sini diartikan sebagai aturan main dari sistem yang berjalan. Sistem yang modern memerlukan institusi yang modern pula, sehingga fungsi sistem berjalan dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid hanya cakap memopulerkan gagasan-gagasan besar, tetapi tidak membumi, karena tidak cakap merancang institusi yang efektif dan fungsional.

Era Orde Baru

Persoalan paling mendasar dalam era Orde Baru (Soeharto) adalah *campur aduk* institusi negara dan swasta, yang saling mengotori satu sama lain. Jabatan publik, perusahaan, dan yayasan dicampur aduk satu sama lain sehingga kekuasaan menjadi pemenang yang mengambil segala potensi keuntungan ekonomi maupun sosial.

Akses publik yang lebih luas terhadap sumber-sumber ekonomi menjadi tertutup sehingga proses pemerataan pendapatan dikorbankan. Kesenjangan antargolongan kemudian menjadi pemandangan biasa, yang mencerminkan parahnya perasaan keadilan publik. Peraturan ko-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

lektif seperti ini potensial memicu masalah sosial baru.

Institusi ini bersifat primitif, karena aturan main untuk mendukung sistem sangat elitis dan tergantung pada perilaku elite yang berkuasa. Perilaku ini secara bertahap menjadi institusi, yang berperan menyelesaikan masalah, tetapi bias kepentingan kelompok kecil. Proses pengambilan keputusan masalah-masalah publik yang besar tidak terbuka, termasuk keputusan ekonomi, investasi, dan lainnya.

Dalam simplifikasi yang tidak rumit, negara seharusnya berperan sebagai wasit dan swasta berperan sebagai pemain. Kesalahan Orde Baru adalah campur aduk dalam peranan yang tidak jelas ini, yakni antara pemain dan wasit. Wasit ikut campur menjadi pemain sehingga menimbulkan persoalan terhadap keadilan

Institusi kepresidenan merupakan faktor pokok dan mendasar, yang paling rusak dan mempengaruhi seluruh segmen institusi negara di bawahnya, termasuk di daerah-daerah. Dalam masa Orde Baru institusi kepresidenan adalah *the ruler*, yang mengatur segalanya. Fungsi *check and balance* tidak bekerja dan parlemen menjadi stempel karet. Sistem digerakkan dari institusi ini, yang dipengaruhi secara kuat oleh karakter individu. Dengan demikian, institusi yang obyektif berdasarkan aspirasi kolektif tidak berkembang. Ini sekaligus menjadi penyebab macetnya demokratisasi politik dan ekonomi.

Pepatah mengatakan bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Karena institusi kepresidenan bermasalah dan mengalami distorsi terus-menerus, yang dibiarkan dalam masa yang panjang, maka kerusakan sistem menjalar luas ke berbagai bidang kehidupan dan daerah-daerah. Fenomena korupsi tidak hanya terlihat di pusat, tetapi juga di berbagai bidang dan daerah-daerah.

Persoalan mendasar tersebut terjadi di kepala, yakni pada institusi kepresidenan tadi. Bagaimana institusi kepresidenan ini rusak? Peran yang dilakukan oleh presiden pada masa Orde Baru adalah peran ganda sebagai institusi negara, yang menjadi regulator, tetapi tercampuri oleh pengaruh kelompok kepentingan swasta.

Aturan main yang seharusnya tidak ditegakkan dan kelompok kepentingan dengan mudah diakomodasi dalam kekosongan institusi seperti ini. Akibatnya adalah kerusakan sistemik dari birokrasi secara vertikal tingkat atas sampai bawah dan secara horiz[redacted]e kanan[redacted]

Persoalan keadilan dan keterbukaan sistem menjadi korban dari distorsi kelembagaan kepresidenan seperti ini. Jadi, pemerintahan berjalan tidak disandarkan pada institusi yang benar, tetapi lebih mengacu pada karakter individu, yang terinternalisasikan ke dalam institusi.

Institusi kontrol yang lemah adalah faktor paling krusial di dalam masa Orde Baru. Akibatnya, korupsi menjadi semakin meluas ke berbagai penjuru dan merusak sendi-sendi bangunan, yang telah dibangun sendiri.

Era Abdurrahman Wahid

A. Menteri Restrukturisasi

Kasus penunjukan figur-figur di dalam kabinet adalah bagian dari penegakan institusi. Secara khusus, hal ini dapat dilihat pada susunan kabinet, yang sebagian tidak fungsional. Itu berarti bahwa penegakan institusi yang fungsional tidak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Suatu ketika saya bertemu Cacuk Sudarijanto di *lift* gedung Aetna belum lama ini. Saya menangkap raut wajah yang biasa saja, lumrah seperti saya kenal, dan senyum mengembang seperti apa adanya. Tidak ada yang berubah dari diri mantan Direktur Utama Telkom dan Bank Mega, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan kini Menteri Restrukturisasi Ekonomi ini. Bahkan, saya pun sebelumnya bercanda sesaat ketika *ngunduh mantu* di rumahnya.

Itu kesan pribadi. Akan tetapi publik sekarang bertanya di mana Cacuk Sudarijanto? Pertanyaannya ini wajar, tidak dalam kapasitas pribadi, tetapi dalam posisi dan peranannya saat ini. Bagi saya pun pertanyaan ini penting karena jabatan yang dipegangnya adalah jabatan publik, yang harus terbuka dan akuntabel kinerjanya terhadap masyarakat luas. Bahkan, posisinya sekarang sebagai menteri secara formal lebih tinggi dari jabatan sebelumnya, yakni Ketua BPPN.

Publik belum tahu kinerja institusi di kementerian restrukturisasi, yang namanya terkait erat dan diduga akan berperan sentral dalam masa krisis ini. Pembenahan institusi swasta pada dasarnya adalah restrukturisasi, baik korporasi maupun perbankan. Seharusnya posisi kementerian ini bersifat utama, sesuai nama dan gagasan yang ada di baliknya.

Akan tetapi, selama kabinet Abdurrahman Wahid jilid II yang berjalan beberapa bulan ini, tidak terlihat dinamika peran kementerian di bawah Cacuk ini. Inilah contoh kasus penting dan dalam ekonomi politik disebut kelemahan atau ketidakberdayaan institusi (*weakness of the institutions*).

Ciri kelemahan ini adalah kesalahan paling mendasar dari pemerintahan Abdurrahman Wahid, sehingga pemerintah kekurangan mesin lokomotif untuk mengantarkan masyarakat ke gerbang cita-cita reformasi dan perbaikan dalam kehidupan ekonomi dan sosial-politiknya.

Tidak hanya kelemahan, institusi formal dengan informal (*underground*) serta kabinet formal dengan kabinet malam campur aduk tidak keruan, sehingga memperburuk citra dan kinerja pemerintah. Kritik yang keras dari masyarakat luas yang waras, pers, dan bahkan dari profesional dan parlemen tidak bisa dihindari. Hasilnya adalah *vote of no confidence* di dalam dan di luar parlemen.

Khusus untuk kasus Kementerian Restrukturisasi Ekonomi, apa masalah yang terjadi sebenarnya? Pertama, kementerian ini lebih sebagai produk atau hasil dari gagasan yang besar tetapi sangat cair dan mengambang.

Cita-cita besar di balik gagasan itu tidak lain untuk menjadikan Menteri Restrukturisasi ini sebagai salah satu kendaraan menuju pintu keluar dari krisis. Dari sisi namanya, kata restrukturisasi adalah kunci penting dan utama dalam pemulihan ekonomi dan merupakan cara yang tepat untuk mengatasi krisis.

Kedua, pemerintah sendiri hanya repot dengan gagasan di langit dan tidak cakap merumuskan rancangan detail fungsi-fungsi yang harus dan bisa dilaksanakan oleh kementerian ini. Institusionalisasi hanya dirumuskan pada tingkat wacana, tidak dalam pengertian institusi yang sebenarnya dengan fungsi serta peran yang jelas.

Ketiga, persoalan pokok yang menimpa pemerintah tidak lain adalah ketidakcakapan dalam merumuskan institusi dalam aksi kolektif, ekonomi politik, dan kebijakan publik umumnya. Saran dan kritik diabaikan dan ditanggapi secara arogan.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid hanya cakap memopulerkan gagasan-gagasan besar, tetapi tidak membumi, karena tidak cakap merancang institusi yang efektif dan fungsional. Akhirnya, manajer yang cukup makan asam garam sekelas Cacuk cuma jadi pajangan di dalam kabinet jilid II sekarang ini.

Keempat, publik tidak melihat tim ekonomi saling bahu-membahu, kecuali pertama kali diangkat. Ketika itu, Cacuk berinisiatif untuk mengundang seluruh tim ekonomi, saling be-

rangkulan di depan publik dan hendak mengatakan kepada masyarakat luas bahwa tim itu satu dan *solid*. Namun setelah itu, Cacuk hilang dan terkucilkan dengan peran yang kosong, meskipun posisi formalnya bermartabat sebagai menteri.

Inilah persoalan klasik dalam tatanan pemerintahan dan sistem ekonomi politik era Abdurrahman Wahid sekarang ini. Sesuatu yang tampak hebat diciptakan, tetapi cuma kotak kosong. Sebaliknya, sesuatu yang fungsional dan tampak buruk lalu dilibas tanpa ampun. Keputusan-keputusan publik diambil hanya dengan insting yang reaksioner, impulsif, dan tidak dipikirkan secara matang.

B. Kasus Depsos dan Deppen

Contoh lain adalah Departemen Sosial, yang mempunyai fungsi pengamanan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, yang dihancurkan begitu saja hanya karena ada kesan atau citra keadaan buruk dan korupsi di dalamnya. Sikap reaktif dan impulsif yang muncul sebagai kebijakan adalah membubarkannya. Cara reaksioner seperti ini paling mudah dilakukan, tidak perlu banyak pikiran, waktu dan usaha melaksanakannya.

Logika berpikir seperti ini seolah-olah hebat dan berhasil menyelesaikan masalah, yakni korupsi. Akan tetapi persoalan lain dalam kaitan perlindungan masyarakat rentan menjadi hilang, padahal diperlukan sekali dalam masa krisis ini. Jika logika seperti ini dipakai, maka yang harus dibubarkan semua departemen karena di dalamnya juga sarat korupsi.

Dari dua kasus ini, kementerian Restrukturisasi Ekonomi dan pembubaran Departemen Sosial, terlihat kelemahan pokok pemerintahan Abdurrahman Wahid sekarang ini. Institusi dibuat tetapi bermasalah dan tidak bermakna. Institusi seperti inilah yang terjadi pada pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kesalahan rancangan institusi juga terjadi ketika ia pertama kali berkuasa, yang kemudian langsung menginstitusikan secara formal pengusaha konglomerat (Dewan Pengembangan Usaha Nasional/DPUN) di dalam institusi kepresidenan. Ini kesalahan fatal, bukan hanya karena konglomerat itu bermasalah, tetapi juga karena mencampur aduk institusi swasta dan pemerintah adalah sistem ekonomi politik yang primitif seperti terjadi pada masa Orde Baru.

Pengusaha besar dengan kepentingan ekonomi yang besar pula seharusnya dipagari dengan batas aturan yang tegas, agar tidak terlibat dengan proses pengambilan keputusan ekonomi. Pembentukan DPUN justru menggiring pengusaha ke istana, yang potensial untuk masuk dalam konflik kepentingan ekonomi.

Beruntung sekali lembaga ini bubar. Namun yang patut dicatat, pembangunan institusi yang modern dan sehat masih belum menjadi visi pemerintah dalam masa reformasi ini.

Campur aduk peran penguasa Orde Baru di dalam posisi institusi kepresidenan dengan peran lingkaran swasta di sekitarnya menghasilkan KKN yang luar biasa besar. Kritik untuk tidak mengulangi penataan institusi seperti ini dilayangkan kepada Abdurrahman Wahid, tetapi dijawab "gitu aja kok repot". Tidak berpengalaman tetapi anti kritik, bahkan arogan menanggapinya.

Jadi, persoalan pembangunan institusi masih merupakan unsur paling lemah di dalam pemerintahan selama tiga puluh tahun terakhir ini. Budaya politik dan karakter individu berpengaruh besar terhadap institusi sehingga aturan main yang seharusnya sulit terwujud. Kelemahan dalam kelembagaan ini menyebabkan sistem lemah dan tidak cukup kuat menahan gejolak ekonomi dan politik.

Penyakit kelemahan institusi ini berjangkit terus dari rezim ke rezim, sehingga sistem ekonomi politik yang ketat tidak dapat diwujudkan dengan baik. Selama suatu bangsa tidak dapat membangun sistem kelembagaannya, maka selama ini pula akan terus terperangkap ke dalam krisis. **(Didik Rachbini**, *Direktur Indef*)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 27 / FEBRUARI / 2003
Hlm/Kolom : 20 / 1-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : Raka, Frady
No_Klass/Subjek : EKONOMI / 330.9

Minuman Rakyat Cap Tikus

Dilema Ekonomi Rakyat Minahasa

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) sudah berkali-kali mengingatkan bahwa lebih dari 50 persen tindak pidana kriminal di Sulut disebabkan karena pelakunya sudah lebih dulu minum Cap Tikus, minuman keras produksi rakyat yang kadar alkoholnya rata-rata 40 persen. Tetapi, baik kepolisian maupun pemerintah daerah (pemda) enggan menerbitkan larangan memproduksi dan mengedarkan minuman Cap Tikus. Minuman pembawa maut ini masih saja beredar dan bisa dibeli dengan bebas di warung-warung.

POLDA maupun pemda sangat memahami bahwa minuman Cap Tikus bagi Sulawesi Utara, khususnya rakyat Minahasa, bukan cuma sekadar minuman beralkohol. Lebih dari itu, Cap Tikus yang diproduksi secara tradisional oleh ribuan rakyat Minahasa ini sudah terbukti mampu menjadi salah satu basis ekonomi rakyat Minahasa. Dengan Cap Tikus, ribuan petani Minahasa mampu eksis di tengah-tengah krisis multidimensi.

Demi membela ekonomi rumah tangga, ribuan petani Cap Tikus—bahkan ketika berlangsung unjuk rasa di awal tahun 2002 lalu—tanpa mengenal rasa takut meloncati pagar batas halaman Markas Polda Sulawesi Utara di Jalan Bethesda, Manado. Di sana, ketika berhadap-hadapan dengan Kepala Polda Brigjen (kini Irjen) Ismerda Lebang dan pejabat teras Polda Sulut, ribuan petani Cap Tikus menyampaikan protes keras terhadap kebijakan membatasi peredaran minuman Cap Tikus dan beragam minuman anggur yang berbasis bahan baku Cap Tikus.

Jauh sebelum Ismerda Lebang menduduki kursi nomor satu Polda Sulut, Kepala Polda Brigjen (Pol) Anton Tifaona bersama Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Prof RS Tangkudung di tahun 1986 menyelenggarakan seminar sehari yang bertujuan mencari alternatif dan solusi mengenai Cap Tikus. Anton Tifaona ketika itu prihatin terhadap tingginya tindak kriminal di Sulut yang disebabkan oleh minuman Cap Tikus.

Seminar yang melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu itu antara lain merekomendasikan perlunya peningkatan kadar alkohol pada Cap Tikus sehingga layak menjadi bahan baku obat-obatan dan parfum.

Pendapat lain yang muncul pada seminar tentang Cap Tikus ketika itu, jika sebagian dari produksi Cap Tikus diarahkan untuk konsumsi minuman beralkohol, maka mutunya harus ditingkatkan sehingga layak dipajang di toko-toko swalayan. Mutu Cap Tikus harus ditingkatkan dari sekadar minuman warungan menjadi minuman yang setara wisky, brandy, atau sejenisnya, serta layak masuk pasar ekspor.

Pada gilirannya, tak ada lagi minuman Cap Tikus yang dijual dengan harga murah di warung-warung. Sebab, ketika itu produksi Cap Tikus diharapkan sudah terserap habis oleh industri minuman keras bermutu tinggi, atau pun oleh pabrik farmasi serta industri lain yang berbasis bahan baku alkohol.

Ternyata kemudian semua rumusan indah hasil seminar yang diprakarsai Polda Sulut itu tak satu pun yang bisa dioperasionalkan. Pemda Sulut yang mestinya berada di garda terdepan untuk mempromosikan Cap Tikus dari sekadar minuman warungan, tak sedikit pun mengutak-atik gagasan atau konsep tersebut.

Cap Tikus tetap saja menjadi minuman murahan yang dengan mudah dijumpai di warung-warung dan terus memangsa para penggemarnya, khususnya kaum muda. Bahkan menurut laporan Polda Sulut, hingga saat ini Cap Tikus masih menjadi penyebab naiknya jumlah tindak kriminal di Sulut. Beberapa perwira tinggi TNI asal Sulut dengan blak-blakan mengungkapkan keprihatinannya tentang gagalnya banyak calon taruna militer asal Sulut karena dalam pemeriksaan kesehatan dia gugur di tengah jalan akibat paru-parunya tidak lagi bersih karena minuman tersebut.

MEMBIARKAN produksi Cap Tikus, menurut berbagai kalangan, termasuk para pemimpin agama, sama saja dengan menjerumuskan kaum muda Sulut ke jurang dan neraka yang dalam. Tetapi sebaliknya, para pengamat lainnya berpendapat, melarang produksi dan peredaran Cap Tikus, juga bukan jalan keluar atau solusi yang bijak.

Ribuan petani Cap Tikus—menyusul kebijakan melarang produksi dan peredaran Cap Tikus awal tahun 2002—dengan lantang bersaksi bahwa melarang Cap Tikus sama dengan membunuh tulang punggung ekonomi mereka. Dengan lantang pula ketika itu mereka berkata, Cap Tikus telah membuat mereka mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai menjadi sarjana.

Tema-tema seperti itu yang diusung oleh ribuan petani saat melancarkan aksi awal tahun lalu di DPRD, Polda, dan Kantor Gubernur Sulut. Menurut mereka (petani Cap Tikus), kebijakan melarang peredaran Cap Tikus sama dengan kebijakan frustrasi. Mestinya pemerintah memprakarsai munculnya solusi yang tepat, bukan lalu menyalahkan atau kemudian mengorbankan petani.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah selaku pengendali dan pembuat kebijakan berada pada posisi sangat sulit. Maju kena, mundur juga kena. Membiarkan Cap Tikus terus diproduksi dan beredar, sama dengan membiarkan maut terus bergentayangan. Tetapi, melarang

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

produksi dan peredaran Cap Tikus, berarti pemerintah juga harus berhadapan dengan protes keras, karena dinilai sebagai tindakan bodoh dan konyol.

Kebijakan pemerintah bisa dianggap simpatik dan konstruktif jika pemerintah mau membuka kembali rumusan-rumusan indah hasil seminar Polda Sulut dan Unsrat tahun 1986, yang mungkin saja masih tersimpan rapi di lemari Kantor Rektorat Unsrat ataupun Markas Polda Sulut. Beberapa rekomendasi seminar yang belum sempat dioperasionalkan pada akhir tahun 1980-an, mungkin di era 2000-an sekarang sudah cocok dilaksanakan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan juga kalangan perguruan tinggi tidak bisa lepas tangan dan menimpakan tanggung jawab itu semata hanya kepada Polda Sulut. Pemprov dan perguruan tinggi justru harus menjadi ujung tombak untuk mencarikan alternatif terbaik tanpa harus merugikan masyarakat petani Cap Tikus.

CAP Tikus adalah jenis cairan berkadar alkohol rata-rata 40 persen yang dihasilkan melalui penyulingan *saguer* (cairan putih yang keluar dari mayang pohon enau atau *seho* dalam bahasa daerah Minahasa). Tinggi rendahnya kadar alkohol pada Cap Tikus tergantung pada kualitas penyulingan. Semakin bagus sistem penyulingannya, semakin tinggi pula kadar alkoholnya.

"Cap Tikus dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif di tengah krisis bahan bakar minyak Bumi. Soalnya, produksinya bisa dilipatgandakan."

Saguer sejak keluar dari mayang pohon enau sudah mengandung alkohol. Menurut kalangan petani, kadar alkohol yang dikandung *saguer* juga tergantung pada cara menyuling dan peralatan bambu tempat menampung *saguer* yang menetes keluar dari mayang pohon enau.

Untuk mendapatkan *saguer* yang manis bagaikan gula, bambu penampungan yang digantungkan pada bagian mayang tempat keluarnya cairan putih (*saguer*), berikut saringannya yang terbuat dari ijuk pohon enau harus bersih. Semakin bersih, *saguer* semakin manis. Semakin bersih *saguer*, maka Cap Tikus yang dihasilkan pun semakin tinggi kualitasnya.

Kadar alkohol pada Cap Tikus tergantung pada teknologi penyulingan. Petani sejauh ini masih menggunakan teknologi tradisional, yakni *saguer* dimasak kemudian uapnya disalurkan dan dialirkan melalui pipa bambu ke tempat penampungan. Tetesan-tetesan itulah yang kemudian dikenal dengan minuman Cap Tikus.

Cap Tikus sudah dikenal sejak lama di Tanah Minahasa. Memang tidak ada catatan pasti kapan Cap Tikus mulai hadir dalam khazanah budaya Minahasa. Namun, setiap warga Minahasa ketika berbicara tentang Cap Tikus akan menunjuk bahwa minuman itu mulai dikenal sejak nenek moyang mereka.

Yang pasti, minuman Cap Tikus sudah sejak dulu sangat akrab dan populer di kalangan petani Minahasa. Umumnya, petani Minahasa, sebelum pergi ke kebun atau memulai pekerjaannya, minum satu seloki (gelas ukuran kecil, sekali teguk) Cap Tikus. Minuman ini, menurut Pendeta Dr Richard AD Siwu, dosen Fakultas Teologi Universitas Kristen Tomohon (Ukit) dikenal oleh setiap orang Minahasa sebagai minuman penghangat tubuh dan pendorong semangat untuk bekerja.

Sadar betul bahwa Cap Tikus mengandung kadar alkohol tinggi, sudah sejak dulu orang-orang tua mengingatkan agar bisa menahan atau mengontrol minum minuman Cap Tikus. Sejak dulu pula dikenal pameo menyangkut Cap Tikus, minum satu seloki Cap Tikus, cukup untuk menambah darah, dua seloki bisa masuk penjara, dan minum tiga seloki bakal ke neraka.

Pak tani minum Cap Tikus karena memang dengan satu seloki semangat kerja bertambah. Karena itu, minum satu seloki Cap Tikus diartikan menambah darah, dan semangat kerja.

Tanda awas langsung diucapkan setelah menenggak satu seloki, sebab jika menambah lagi satu seloki bisa berakibat masuk penjara. Artinya, dengan dua seloki orang bakal mudah terpancing bertindak berlebihan, karena kandungan alkohol yang masuk ke tubuhnya membuat orang mudah tersinggung dan rentan berbuat kriminal.

Jenis minuman ini diproduksi rakyat Minahasa di hutan-hutan atau perkebunan di sela-sela hutan pohon enau. Pohon enau—atau *saguer* dalam bahasa sehari-hari di Manado—disebut pohon *saguer* karena pohon ini menghasilkan *saguer*, atau cairan putih yang rasanya manis keasam-asaman serta mengandung alkohol sekitar lima persen.

Warung-warung makan di Minahasa pada umumnya juga menjual *saguer*. Bahkan, sebagian orang desa sebelum makan lebih dulu meminum *saguer* dengan alasan agar bisa makan banyak.

Sisa *saguer* yang tidak terjual kemudian disuling secara tradisional menjadi minuman Cap Tikus. Kadar alkoholnya, sesuai penilaian dari beberapa laboratorium, naik menjadi sekitar 40 persen. Makin bagus sistem penyulingannya, dan semakin lama disimpan, kadar alkohol Cap Tikus semakin tinggi. Di kalangan para peminum, Cap Tikus yang baik akan mengeluarkan nyala api biru ketika disulut korek api.

Mengapa dinamai Cap Tikus? Tidak diperoleh jawaban yang pasti. Ada dugaan, nama itu dipakai karena pembuatannya dilakukan di sela-sela pepohonan, tempat tikus hutan bermain hidup.

Jika di masa lalu, khususnya di kalangan para petani, Cap Tikus menjadi pendorong semangat kerja, lain hal lagi dengan kaum muda sekarang. Kini Cap Tikus telah berubah menjadi tempat pelarian. Cap Tikus telah berubah menjadi [illegible] tempat pelampiasan [illegible] serta menjadi sarana [illegible]-mabukan yang kemudian [illegible] menjadi sumber malapetaka. [illegible] Selain bisa diminum langsung, Cap Tikus juga menjadi [illegible] bahan baku utama sejumlah [illegible] produk anggur di Manado dan [illegible] Minahasa. Dengan predikat [illegible] anggur, Cap Tikus masuk ke [illegible] dan bahkan di antarpulau secara gelap.

[illegible] Bagi Polri, anggur dari Cap Tikus merupakan persoalan [illegible] yang tak kunjung selesai. Data [illegible] di Sulawesi Utara-tengah (Sulutteng) antara lain menyebutkan, lebih dari 50 persen kasus pelanggaran kamtibmas disebabkan si pelakunya sudah lebih dulu menenggak anggur Cap Tikus.

◆◆◆

MEMBERANTAS Cap Tikus yang diproduksi massal di hutan-hutan memang bukan pekerjaan gampang. Dr RAD Siwu STh mengatakan, persoalan di sekitar *saguer*, Cap Tikus, atau anggur dari bahan Cap Tikus tidaklah sederhana. Pengamat sosial ini justru melihat inti masalah, bagaimana meningkatkan Cap Tikus se-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

hingga mampu menjadi komoditas yang bisa ikut dipajang di pasar swalayan. Tidak lagi sekadar minuman di warung-warung.

Apa bedanya Cap Tikus dengan jenis alkohol lain seperti wisky impor. "Mengapa Cap Tikus tidak dimodifikasi lewat teknologi tertentu sehingga mampu tampil sejajar dengan alkohol impor," kata Siwu. Bahkan, Cap Tikus kata Siwu dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif di tengah krisis bahan bakar minyak bumi. Soalnya, produksi Cap Tikus bisa dilipatgandakan, bahkan dapat diperbarui terus lewat penanaman pohon enau.

Menurut data, produksi Cap Tikus, di Minahasa, sebulan bisa mencapai sekitar 800.000 liter. Dan karena produksinya secara sembunyi-sembunyi, maka sulit bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam penarikan retribusi.

Bahkan, untuk menetapkannya lewat ketentuan peraturan daerah (perda) pun sangat dilematis. Sebab, mem-perda-kan retribusi produksi atau pun pemasaran Cap Tikus bisa berarti melegalisasi produksinya.

Sementara itu, Polda Sulut menghadapi tantangan menurunkan tingkat pelanggaran kamtibmas yang bersumber dari minum jenis alkohol tersebut. Artinya, di satu sisi Cap Tikus perlu diberantas karena merupakan salah satu penyebab dari munculnya pelanggaran kamtibmas. Tetapi, di sisi lain Cap Tikus merupakan sumber pendapatan ribuan rakyat Minahasa. Di warung-warung, Cap Tikus yang dikemas dalam botol ukuran botol bir dijual berkisar Rp 2.500-Rp 3.000.

◆◆◆

UPAYA mempertemukan dua kepentingan yang bertentangan itu semestinya difasilitasi pemprov dan Polda Sulut. Baik Polda maupun pemprov ditantang untuk mencarikan jalan keluar, termasuk mempromosikan Cap Tikus dari sekadar minuman warungan.

Dengan munculnya tantangan serius semakin langkanya persediaan bahan bakar minyak (BBM) di perut bumi, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Cap Tikus dapat dijadikan salah satu alternatif potensial. Di sini, peran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atau pun lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi menjadi sangat penting.

Hal ini juga merupakan tambahan peluang bagi Minahasa untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap komoditas kopra, cengkeh, pala, vanili, dan sebagainya.

(FREDDY ROEROE)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 27 / FEBRUARI / 2003
Hlm/Kolom : 13 / 1-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : EKONOMI NASIONAL / 330.9598

Pasca-IMF, Indonesia Berpotensi Dapatkan Rp 524 Trilyun

JAKARTA, KOMPAS — Dengan mengakhiri program International Moneter Fund (IMF) dan meniadakan *rescheduling* utang Paris Club, Indonesia justru akan memperoleh tambahan penerimaan negara sebesar Rp 524 trilyun sampai tahun 2005. Dana tambahan itu bisa diperoleh dengan menjalankan sejumlah skenario alternatif di luar program IMF yang dijalankan pemerintah sekarang.

Dengan skenario alternatif tersebut, Indonesia akan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja yang cukup besar, dan memberikan landasan ekonomi dan kelembagaan yang kuat di masa-masa mendatang.

Demikian dikemukakan sejumlah pakar ekonomi yang tergabung dalam tim perumusan skenario "Indonesia Bangkit" pasca-IMF di Jakarta, Rabu (26/2). Tim Indonesia Bangkit antara lain mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, Penasihat Kepala Bappenas Sri Edi Swasono, Direktur Indef Didik J Rachbini, dan pengamat ekonomi Revrisond Bazwir.

Rizal mengatakan, rincian dana tambahan penerimaan sebesar Rp 524 trilyun adalah Rp 125 trilyun tahun 2003, Rp 202 trilyun tahun 2004, dan Rp 197 trilyun tahun 2005.

Sementara, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2003, jumlah penerimaan negara sebesar Rp 336,155 trilyun, defisit anggaran Rp 34,436 trilyun, dan tambahan stimulasi pembangunan Rp 10,6 trilyun.

Dijelaskan, dana tambahan itu diperoleh, baik dengan meningkatkan penerimaan maupun menghemat pengeluaran.

Sejumlah skenario yang diusulkan tim Indonesia Bangkit untuk meningkatkan penerimaan negara antara lain berupa, reformasi sektor perpajakan; optimalisasi penggunaan dana seperti saldo anggaran lebih (SAL), rekening dana investasi (RDI), dan rekening 69; optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam minyak bumi dan gas seperti menjual *minority stake* Pertamina sebesar 20 persen kepada masyarakat; dan peningkatan penerimaan sektoral seperti restrukturisasi BUMN telekomunikasi.

Sementara, skenario penghematan pengeluaran adalah dengan restrukturisasi utang dalam negeri. "Caranya adalah mengurangi utang pokok terlebih dahulu agar beban bunga berkurang," kata Rizal.

Tim Indonesia Bangkit menilai, penerimaan negara seperti tercantum dalam APBN 2003 belum optimal, sangat minimalis, dan tidak perlu kerja keras.

Rizal mencontohkan, wajib pajak sebenarnya bisa ditingkatkan dari 2,9 juta orang menjadi 5 juta orang. Selain itu, efektivitas penerimaan pajak masih sekitar 33 persen akibat adanya kolusi petugas pajak dengan wajib pajak.

"Dari reformasi sektor pajak, potensi tambahan penerimaan negara Rp 90 trilyun," kata Rizal. Berdasarkan APBN tahun 2003, penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 13 trilyun.

Stimulus meningkat

Dengan tambahan penerimaan negara, menurut Rizal, stimulus fiskal menjadi lebih besar sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Stimulus fiskal Rp 10 trilyun-Rp 15 trilyun seperti sekarang tidak akan berarti apaapa. Amerika Serikat saja membutuhkan stimulus Rp 600 trilyun untuk sedikit memperbaiki perekonomiannya," kata Rizal.

Ditambahkan, stimulus fiskal akan digunakan untuk meningkatkan anggaran sejumlah sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, keamanan dan penegakan hukum, infrastruktur, dan restrukturisasi industri.

Dengan kondisi tersebut, Rizal yakin pertumbuhan ekonomi bisa 6-7 persen hingga tahun 2005. Penyerapan tenaga kerja mencapai 8,1 juta orang.

"Dengan menjalankan program IMF, pertumbuhan ekonomi hanya 3-4 persen, dan penyerapan tenaga kerja hanya 4,5 juta orang," kata Rizal.

Bom waktu

Didik mengatakan, dengan lepas dari IMF, Indonesia memiliki fleksibilitas dan ruang gerak lebih, dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi.

Dijelaskan, selama ikuti IMF dalam jangka waktu lima tahun, justru Indonesia mendapatkan banyak dampak negatif yang akhirnya menjerumuskan Indonesia ke jurang kehancuran.

"Salah satu dampak negatif yang diciptakan IMF adalah bom waktu berupa utang dalam negeri Rp 650 trilyun," kata Revrisond Bazwir.

Rizal menambahkan, saat ini ada sejumlah pihak yang meminta kontrak IMF diperpanjang sampai tahun 2005 karena adanya *rescheduling* utang Paris Club 2,5 milyar dollar AS tahun 2004. "Padahal, sebenarnya mereka hanya ingin tetap memiliki posisi tawar yang kuat dengan Pemerintah Indonesia mendatang," katanya. (B15)

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 10 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 4 / 3-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : PRASETIAHONO / A - TOMY
Subjek : BANK DUNIA / 332.153 2

Reposisi "Kontrak" IMF

CONVINCING people at the World Bank of my analysis proved easy; changing minds at the IMF (International Monetary Fund) was virtually impossible. Meyakinkan orang-orang di Bank Dunia mengenai analisis saya terbukti mudah; tetapi mengubah pikiran orang-orang di Dana Moneter Internasional (IMF), bisa dibilang nyaris mustahil. Begitu gerutu pemenang Nobel Ekonomi 2001, Joseph Stiglitz, dalam tulisannya *What I Learned at The World Economic Crisis (The New Republic,* 17/4/2000).

Sikap keras kepala IMF, mungkin diilhami kehebatan komposisi para ekonom yang bekerja di lembaga multilateral itu. Semua orang pasti setuju, IMF berisi sekumpulan ekonom kelas satu lulusan Harvard, Stanford, MIT, maupun Chicago. Namun, itu semua bukan jaminan. Mereka tetap saja bisa "kecolongan".

Wacana klasik

Satu contoh klasik yang paling sering disebut adalah, betapa IMF pernah "lupa" menyiapkan infrastruktur jaring pengaman (*safety net*) yang memadai, saat menutup 16 bank di Indonesia pada 1 November 1997, yang kemudian berefek bola salju raksasa krisis ekonomi yang teramat dalam (lihat Paul Blustein, *The Chastening: Inside the Crisis that Rocked the Global Financial System and Humbled the IMF, Public Affairs*, New York, 2001). IMF dan Pemerintah Indonesia baru menyadari kekurangan ini dengan meluncurkan skema penjaminan (*blanket guarantee*), tetapi itu baru dilakukan 27 Januari 1998, saat *rush* sudah terjadi dan bank-bank hancur berantakan.

Tenggang waktu (*time lag*) antara keputusan likuidasi 16 bank dan perangkat pengamannya yang sampai tiga bulan, ternyata telah menimbulkan konsekuensi dahsyat, berupa kerusakan mahaberat dalam sistem perbankan kita. Slogan *time is money* benar-benar terasa dalam kasus ini. Lengah sedikit dan terlambat tiga bulan IMF memberi terapi tepat, ongkosnya amat mahal. Adilkah kerusakan ini ditanggung bangsa Indonesia sendiri? IMF tentu harus ikut bertanggung jawab.

Stiglitz yang berpengalaman sebagai Ketua Dewan Penasihat Ekonomi (*Council of Economic Advisers*) di Gedung Putih (1993-1997), *chief economist* di Bank Dunia (1997-2000), bahkan pernah mengemukakan sebuah *inside story* yang membuat kita tercengang. Menurut sumber "orang dalam" yang diperolehnya, orang-orang IMF yang hebat-hebat itu, ternyata bisa teledor membuat laporan.

Sebuah laporan suatu negara, dikopi begitu saja untuk negara lain (*cut and paste*), hanya dengan mengubah nama negara dan data lokal saja. *Gile bener!* Analisisnya praktis sama, seolah-olah semua negara tak memiliki nuansa perbedaan sama sekali. Suatu ketika, tindakan ini sempat "kecolongan", saat nama negara yang dikopi sempat muncul di beberapa halaman laporan! Ini sempat menjadi bahan olok-olok Stiglitz di beberapa makalahnya. Saya yakin Stiglitz tidak sedang mengarang fiksi dengan cerita menggelikan ini. Reputasi pemenang Nobel yang pernah mengajar di sejumlah universitas paling top dunia: Oxford, MIT, Standford, Princeton, dan kini Columbia (New York City), jelas dipertaruhkan untuk kritik-kritiknya yang "galak".

Stiglitz juga mengkritik, ekonom-ekonom top IMF itu tahunya cuma tidur di hotel berbintang lima di negara pasien, tetapi tidak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi di negara yang menjadi pasiennya. Pengamatan mereka cenderung bias dan kurang mendalam terhadap setiap fenomena yang muncul di negara pasien.

Sedangkan menurut Jeffrey Sachs, ekonom kondang dari Harvard, ada dua kesalahan terbesar IMF dalam menangani krisis di Asia, khususnya Indonesia (*The Wrong Medicine for Asia, The New York Times*, 3/11/97).

Pertama, terapi suku bunga tinggi bersifat kontraproduktif, karena hanya akan membangkrutkan perusahaan-perusahaan. Kebijakan suku bunga ini dimaksudkan IMF untuk menaikkan *confidence*, supaya tidak terjadi pemborongan dollar dan menghentikan pelarian modal ke luar negeri. Para pembela IMF mengatakan, tindakan menaikkan suku bunga itu sudah benar, karena jika suku bunga tidak dinaikkan, kurs rupiah menjadi lebih jelek lagi.

Kesalahan kedua, IMF menggunakan jalur pemotongan anggaran pemerintah (*budget cuts*), yang berdampak pada melemahnya daya stimulus terhadap perekonomian. Padahal dalam keadaan resesi ekonomi (yang menjurus ke depresi ekonomi, atau situasi yang lebih buruk lagi), hal yang paling penting dibutuhkan adalah stimulus, yang di antaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu ekonom terbaik dunia, John Maynard Keynes, pernah membuktikan hal ini saat menghadapi depresi hebat tahun 1930-an. Namun, mengapa IMF justru bersikap sebaliknya, APBN dipotong seketat-ketatnya, dan membiarkan perekonomian Indonesia kekurangan daya stimulus?

Pendapat Sachs itu kurang-lebih sejalan dengan pemikiran Stiglitz. Sachs memandang, kasus Asia adalah hal yang amat unik. *The Asian story is hardly unique.* Karena itu, jangan berpikir dapat meningkatkan *confidence* dengan cara yang tradisional-standar, yakni dengan menaikkan suku bunga.

Kepercayaan pasar sebenarnya justru mulai bisa dibangun saat IMF mengumumkan paket besar 33 milyar dollar AS di akhir Oktober 1997, saat pertama kali "kontrak" IMF dilakukan terhadap Pemerintah Indonesia. Istilah "kontrak" (dalam tanda kutip) pertama kali digunakan Sachs dalam tulisan-tulisannya di akhir tahun 1997. Pasar sempat bereaksi positif terhadap janji IMF ini, yang diekspresikan menjadi penguatan kurs rupiah.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Sayang, reaksi positif itu hanya sesaat. Mengapa? Pasar rupanya menyadari, penyakit yang diderita perekonomian Indonesia (berupa utang luar negeri swasta jangka pendek yang jatuh tempo, serta kerusakan sektor perbankan) ternyata lebih dahsyat daripada yang semula dibayangkan. Sebelumnya, pihak terkait (Pemerintah Indonesia, IMF, dan para pelaku ekonomi) rupanya *underestimate* terhadap persoalan yang sebenarnya mahaberat itu. Di sisi lain, yang tak kalah penting, janji *bail out* dana sebesar itu (33 milyar dollar) ternyata tidak bisa diberikan IMF seketika. IMF tidak mungkin memberi dana sebesar itu, karena ketiadaan dana di kas mereka.

Paul Krugman, ekonom top MIT yang kini pindah ke Princeton, New Jersey, orang pertama yang mengingatkan, "keajaiban" ekonomi Asia cuma mitos (*The Myth of Asia's Miracle*, *Foreign Affairs*, musim semi 1994), sejak awal sudah menggarisbawahi soal keterbatasan IMF ini. Menurut dia, ada dua keterbatasan IMF yang paling pokok, keterbatasan modal dana (*limited financial capital*) dan keterbatasan modal politik (*limited political capital*) (lihat, *Will Asia Bounce Back?*, pidato Krugman di Credit Suisse First Boston, Hongkong, Maret 1998).

Pendapat Krugman yang sudah dilontarkan empat tahun silam (1998) itu, kini terbukti benar, karena punya banyak pasien gawat dalam waktu bersamaan (Brasil, Argentina, Rusia), IMF ternyata hanya sanggup "menyetor" antara 350 juta dollar hingga 400 juta dollar setiap tiga-empat bulan. Jadi, selama lima tahun kontrak (1997-2002), dana dari IMF yang singgah di cadangan devisa Bank Indonesia hanya sekitar lima milyar dollar. Jumlah ini jelas amat tidak sebanding dengan skala krisis ekonomi Indonesia. Berapa, sih, skalanya? Besaran krisis dapat diukur dari nilai obligasi pemerintah untuk merekapitalisasi perbankan (Rp 700 trilyun), utang luar negeri swasta jangka pendek (60 milyar dollar), atau bisa pula dari nilai pelarian modal sejak 1997 (sekitar 35 milyar dollar). Dari perbandingan ini tampak kontras, betapa dana IMF yang cuma lima milyar dollar tidak memadai untuk menggempur besaran krisis dalam skala raksasa. Ibarat berperang, kita hanya dipersenjatai IMF dengan bedil burung untuk menghadapi dinosaurus. Mana kuat?

Soal keterbatasan modal politik, juga disinggung pengkritik utama IMF yang lain, Allan Meltzer. Profesor di Carnegie Mellon University, Pittsburgh, ini menggarisbawahi dua hal.

Pertama, IMF dianggap terlalu memberi toleransi terhadap praktik korupsi di Indonesia.

Kedua, fenomena moral *hazard* masih subur di Indonesia (*What's Wrong with the IMF? What would Better?*, pidato Meltzer di Federal Reserve Bank of Chicago, 8-10 Oktober 1998).

Kedua hal ini dianggap kurang tersentuh, meski kampanye *good corporate governance* terus digembar-gemborkan. Masalahnya, kampanye semacam itu adalah satu hal, namun litigasi (tindakan hukum) adalah hal lain, yang celakanya sering "tidak nyambung". Inilah salah satu titik rawan problema pemulihan ekonomi di Indonesia, yang mestinya amat disadari IMF.

Perlunya reposisi

Berdasar wacana tentang IMF yang sudah berkembang lama itu (Sachs, misalnya, bahkan sudah menggulirkannya sejak Desember 1997, atau kurang dari dua bulan sejak IMF masuk Indonesia), dan tampaknya masih akan menjadi topik yang selalu hangat dan *debatable*, ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan.

Pertama, IMF harus disadarkan kembali bahwa mereka mempunyai banyak keterbatasan, termasuk yang terpenting sumber dana untuk memasok cadangan devisa para pasiennya. Mereka juga perlu mengakui, bahwa kasus Asia, khususnya Indonesia, merupakan kisah yang unik, sehingga perlu pendekatan solusi yang unik pula. Sudah dijelaskan, misalnya, bagaimana *capital flight* tidak bisa dicegah dengan cara menaikkan suku bunga, karena dalam kasus ini telah bekerja faktor-faktor non-ekonomi (kepanikan yang luar biasa, ekspektasi negatif) yang jauh lebih dominan dibanding faktor ekonomi.

Oleh karena keunikan ini pula, maka yang paling berkompeten memahami adalah para ekonom Indonesia sendiri. Konsekuensinya, IMF harus memberi fleksibilitas atau ruang gerak yang memadai bagi tim ekonomi Indonesia. Semua pengkritik utama terhadap IMF (Stiglitz, Sachs, Krugman, dan Meltzer) umumnya juga sering menekankan perlunya fleksibilitas resep IMF di negara-negara pasiennya.

Sebaliknya, tim Indonesia juga harus pro-aktif dan percaya diri untuk beradu konsep dengan IMF. Hanya dengan cara inilah, segala tuduhan selama ini bahwa "IMF adalah tukang dikte" dapat ditepis.

Kedua, kehendak untuk segera mengakhiri "kontrak" dengan IMF, hendaknya terus diperhatikan dengan serius. Namun, pemutusan "kontrak" tentu tidak bisa dilakukan seketika. Kita perlu persiapan yang relatif cukup. Sebagai contoh, kita harus bisa meyakinkan CGI (Consultative Group on Indonesia), bahwa kita masih memerlukan dukungan mereka terhadap APBN, dengan atau tanpa "kontrak" IMF. Begitu pula dengan Paris Club, yang bertugas memperlonggar skema pembayaran utang. Kita harus mengamankan kedua forum ini lebih dulu, sebelum memutus "kontrak" IMF. Jalan menuju ke sana tentu tidak bisa pendek, katakanlah setahun lagi kita baru bisa melakukannya. Tanpa persiapan semacam ini, dikhawatirkan hasilnya malah kontraproduktif.

Ketiga, jika kelak "kontrak" IMF tak diperpanjang, kita harus bisa mendisiplinkan diri secara ketat. Fungsi IMF sebagai pengawas implementasi LoI (*Letter of Intent*) harus bisa segera digantikan secara efektif oleh kolektivitas legislatif, media massa, pengamat, perguruan tinggi, maupun LSM. Terus terang persyaratan ini agak sulit, tetapi asal didukung kemauan tinggi, ini bukan *impossible mission*.

Akhirnya, hikmah positif yang bisa dipetik dari "ributributan" antara Kwik Kian Gie di satu sisi, serta Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Boediono di seberang lain, seperti menyadarkan bahwa "kontrak" IMF bukan harga mati di Indonesia. Mulai sekarang kita harus mulai menyiapkan segala infrastruktur dan prakondisi yang diperlukan, guna menyongsong "era tanpa kontrak IMF", yang mungkin bisa dimulai setelah kontrak yang sekarang (perpanjangan) berakhir akhir 2003.

Hendaknya hal ini memacu motivasi kita untuk menuju ke sana. Bukan malah berpikir, "Ah, kontraknya, toh, baru saja diperpanjang, dan dengan mudah kita bisa meneken kontrak baru lagi nanti."

Dengan cara pandang bahwa inilah momentum bagus agar IMF mereposisi kontraknya di Indonesia, saya tidak melihat ada yang salah dari kejadian "huruk-pikuk" polemik Kwik. Kalau tidak berpolemik begini, barangkali kita bakal terus terlena ditimang-timang IMF. Siapa yang mau?

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 12 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 12 / 1-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : BUNARTA, Andreas A
Subjek : PERBANKAN / 332.2

Program Penjualan Aset Kredit BPPN

Banyak Mengandung "Loopholes"

MENANGGAPI tulisan Deputi Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Bidang Asset Management Credit (AMC) Moh Syahrial di harian ini, Jumat (2/8) lalu, pertama-tama penulis perlu mengucapkan selamat atas kerja keras yang dilakukan Syahrial dan timnya dalam pelaksanaan *The Summer Mammoth Sale of The Year*, yang tiada lain adalah Program Penjualan Aset Kredit (PPAK) AMC-BPPN.

TIDAK dapat dimungkiri bahwa PPAK merupakan puncak kerja AMC-BPPN sejak dibentuknya BPPN pada awal tahun 1998. Harus diakui bahwa pelaksanaan penjualan aset kredit sebanyak 2.582 debitor dengan nilai utang pokok sebesar Rp 135,4 trilyun ini relatif lebih baik dibandingkan penjualan aset kredit sebelumnya.

Alasannya, pertama, karena prosesnya jauh lebih terkontrol atau terawasi oleh pimpinan BPPN. Kedua, dilakukan secara massal sehingga mengurangi peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ketiga, dengan sekali mengayuh, BPPN mendapatkan Rp 20 trilyun-Rp 24 trilyun sekaligus untuk mendukung target APBN sebesar Rp 42,8 trilyun.

Namun demikian, di balik hiruk-pikuk pelaksanaan PPAK, AMC-BPPN hendaknya jangan menutup mata pada kenyataan-kenyataan bahwa masih ada "lubang-lubang" yang perlu ditambal dan masih luasnya ruang yang perlu diperbaiki.

PPAK sendiri merupakan akibat langsung dari tidak efektifnya pelaksanaan penyehatan atau restrukturisasi kredit macet di AMC-BPPN.

Selama tiga tahun lebih, upaya restrukturisasi ini mandek, tidak jelas progresnya, bahkan ada yang produk akhirnya tidak memadai, sehingga tingkat pengembalian (*recovery rate*) yang dicapai melalui jalur menjual *restructured loan* (kredit macet yang sudah direstrukturisasi) dan menjual *unrestructured loan* (kredit macet yang belum direstrukturisasi) menjadi tidak ada bedanya.

Ironisnya, tujuan awal pembentukan AMC-BPPN sebenarnya bukan untuk melakukan penjualan *unrestructured loan*, tetapi menjalankan fungsi pengelolaan dan penyehatan atau restrukturisasi kredit, sebagaimana namanya.

Jika *recovery rate* dari penjualan piutang BPPN dinyatakan sebesar 29 persen, yang mana hal ini diklaim sebagai tertinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga sejenis di negara lain (Danaharta-Malaysia, Kamco-Korsel, FRA-Thailand, dan lain-lain), maka perlu diingat bahwa *recovery* yang dicapai lembaga di negara-negara ini adalah dari hasil penjualan piutang pada tahun 1998-1999.

Dengan demikian, sebenarnya AMC-BPPN terlambat sekitar empat tahun dalam mencapai *recovery rate* yang 29 persen ini. Dalam perhitungan *present value in rupiah term*, maka *recovery*-nya sebenarnya hanya 16-17 persen saja, dengan asumsi suku bunga rupiah rata-rata 15-18 persen per tahun.

Jika biaya-biaya yang harus ditanggung BPPN selama 3-4 tahun tersebut, seperti biaya operasional, *fee* konsultan finansial, dan konsultan hukum, dimasukkan ke dalam perhitungan *recovery*, niscaya tingkat pengembaliannya akan lebih rendah lagi.

Tingkat pengembalian yang rendah ini tentunya bukan semata-mata terjadi karena AMC-BPPN. Proses restrukturisasi utang, khususnya obligor-obligor besar, memang tidak bisa dilakukan sendirian oleh AMC-BPPN tanpa dukungan penuh dari perangkat hukum yang ada. Sayangnya, AMC-BPPN tidak pernah secara terus terang mengakui ketidaksanggupannya itu.

Seharusnya AMC-BPPN secara terbuka meminta dukungan kepada lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif serta masyarakat banyak, dan jika perlu sesama kreditor lain di perbankan nasional maupun internasional, agar upaya restrukturisasi kredit macet obligor besar tidak menjadi beban AMC-BPPN sendirian.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 (PP 17) seharusnya lebih dapat diefektifkan jika benar-benar disosialisasikan dan didukung masyarakat luas, karena pentingnya fungsi PP 17 dalam rangka penyelamatan aset negara dan pemulihan ekonomi.

Transparansi PPAK

Dapat dimengerti bahwa sangat tidak mungkin jika penjualan massal sebesar PPAK dilakukan dengan terlebih dulu mempersiapkan info memo. Biaya dan waktu yang terbuang untuk mempersiapkan paket informasi bagi investor ini pada akhirnya berpotensi menghilangkan momentum penjualan aset itu sendiri.

Oleh karena itu, AMC-BPPN sebenarnya harus lebih terbuka dan harus mengakui konsekuensi logis dari proses penjualan secara massal ini. Yaitu, pertama, bahwa ada kesenjangan informasi atas aset yang dijual, yang dalam hal ini menguntungkan pihak yang paling mengetahui kondisi aset

PROFIL PERUSAHAAN SEKURITAS

YANG MASUK KE DALAM 20 INVESTOR TERBESAR PPAK (RP MILYAR)

PERUSAHAAN SEKURITAS	MODAL DASAR	MODAL DISETOR	DIREKTUR UTAMA
PT Multi Sarana Inves Sek	25	6,7	Triny Talesu
PT Agung Securities Indonesia	20	13,5	Sutardi
Mahanusa Securities	50	14,7	Maria Ariany Santoso
Asia Kapitalindo Securities	50	50,0	Elly Sabari
Harita Kencana Securities	15	12,0	Lim Christina Hariyanto
Indo Kapital Securities	100	12,5	Dendy Kurniawan
Batavia Prosperindo Sekuritas	25	12,0	Ferry Tedjasasmitha
Panca Global Securities	20	5,0	Trisno Limanto
PT Mandari Securities Ind	200	75,0	Suta Sari Hasim
PT GMT Asset Management (*)	5	1,5	Kusnowardojo

Sumber: Bapepam.go.id (*) Perusahaan Investasi



KOMPAS/DANU KUSWORO

Selamatkan Aset Negara — *Keputusan pemerintah yang menjual aset BPPN mendapat tanggapan puluhan pengunjuk rasa dari Front Rakyat Nasionalis yang menuntut agar pemerintah lebih mementingkan kepentingan rakyat dan penjualan yang transparan.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

kredit tersebut, yang tiada lain adalah para debitor asal.

Kedua, risiko kredit atas aset yang dijual tidak bisa dianalisa secara memadai oleh investor, selain debitor sendiri. Ketiga, debitor lama berkesempatan "mencuri start" dalam memperkirakan harga penawaran atas asetnya sendiri.

Keempat, sangatlah kecil kemungkinan bagi investor lain, selain debitor sendiri, untuk mengajukan harga penawaran yang memadai. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa debitor lama akan menjadi penawar tertinggi atas aset kreditnya sendiri.

Kelima, jika ini terjadi, secara efektif PPAK pada kenyataannya memberi kesempatan kepada debitor asal untuk mendapatkan diskon atas utangnya.

Mencegah *buy-back* debitor asal tidak dapat semata-mata dilakukan AMC-BPPN. AMC-BPPN bahkan telah berupaya maksimal dengan mensyaratkan calon investor menandatangani berbagai macam dokumen hukum yang menyatakan bahwa investor tidak terkait dengan debitor lama.

Namun kenyataannya, tidaklah mungkin bagi AMC-BPPN untuk mencegah investor pemenang menjual aset kredit ini kembali kepada debitor lama. Jika memang demikian, maka AMC-BPPN sebenarnya perlu lebih terbuka pada kenyataan bahwa hampir pasti aset-aset PPAK akhirnya jatuh kembali ke tangan debitor lama. Toh hal ini sudah menjadi "rahasia umum".

Bukan calo?

Dari pengumuman 20 besar pemenang PPAK, penulis melihat hilangnya nama-nama besar di perbankan nasional seperti Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Danamon, dan lain sebagainya. Bahkan, bank-bank rekap, yang semula diharapkan dapat mengurangi obligasi rekapnya melalui pembelian kredit dari BPPN ini, sama sekali tidak terlihat memenangkan aset-aset PPAK.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa investor yang memenangkan PPAK umumnya bukanlah bank-bank komersial. Ini merupakan konsekuensi logis dari rendahnya kualitas aset, khususnya *unrestructured loan*, dan tingginya risiko kredit yang akan membebani kecukupan modal (CAR) bank-bank rekap.

Sejauh ini, dikabarkan jumlah obligasi rekap yang dapat dikurangi dengan menukarkannya dengan aset PPAK hanya sekitar Rp 4 trilyun. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan total nilai aset yang dijual maupun total nilai obligasi rekap di perbankan secara keseluruhan.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan penyehatan perbankan melalui PPAK menjadi tidak tercapai.

Sebaliknya, kita melihat begitu banyak perusahaan sekuritas yang masuk menjadi 20 besar pemenang PPAK. Anehnya, nama-nama perusahaan tersebut banyak yang tidak terlalu dikenal, bahkan ada yang belum pernah terdengar aktif di bidang industri keuangan nasional.

Juga tidak jelas berapa besar modal dari perusahaan-perusahaan ini yang diinvestasikan dalam membeli aset PPAK. Hal ini semakin memberikan indikasi bahwa para investor ini bukanlah investor dalam arti yang sesungguhnya.

Juga tidak terlihat para investor ini adalah investor jangka menengah dan panjang, karena sejumlah nama investor ini diketahui bergerak di bidang konsultasi dan/atau jual-beli aset/saham.

Yang menarik, satu-satunya bank rekap yang memenangkan aset PPAK adalah bank BUMN terbesar di negara ini, Bank Mandiri. Tampaknya, Bank Mandiri berupaya memanfaatkan dan memodifikasi skema *Clearing System* yang ditawarkan BPPN melalui pembentukan konsorsium dengan beberapa mitra (*partner*).

Perlu dicermati bahwa Perjanjian Konsorsium antara Bank Mandiri dan para *Partner*-nya mengandung beberapa hal menarik.

Pertama, Bank Mandiri membiayai 99 persen dari pembelian aset PPAK tersebut, sedangkan *partner*-nya hanya perlu menyediakan satu persennya. Pembayarannya bukan dengan obligasi rekap (sebagaimana diatur dalam *Clearing System* BPPN), tetapi dengan tunai dollar AS atau rupiah yang ditransfer ke rekening BPPN di Standard Chartered Bank.

Kedua, aset kredit yang didapat, kemudian selama tiga bulan akan direstrukturisasi secara terpisah, yaitu porsi *sustainable* masuk ke Bank Mandiri dan porsi *unsustainable* masuk ke *partner*.

Ketiga, porsi *sustainable loan* ini kemudian menjadi *cash loan* baru di Bank Mandiri dengan nilai nominal 99 persen dari harga yang didapat dari PPAK. Jadi, secara efektif, debitor asal otomatis mendapatkan *refinancing* (pendanaan baru) atas utang *sustainable*-nya.

Keempat, porsi *unsustainable* kemudian diubah oleh *partner* menjadi Obligasi Konversi Wajib dengan debitor asal, yang kemudian harus dijual lagi kepada "investor" yang wajib dibawa oleh *partner*.

Partner dan Investor juga haruskan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham debitor asal. Tidak jelas bagaimana nilai konversi utang saat diperhitungkan menjadi saham.

Pertanyaannya, siapakah investor siaga (*stand-by* "investor") yang berani membeli *unsustainable loan* yang sudah tidak ada nilainya itu?.

Meskipun menurut Perjanjian Konsorsium, "investor" harus merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan debitor asal, mungkinkah benar-benar ada investor dari pihak ketiga yang benar-benar menginvestasikan uangnya (yang satu persen itu) menjadi saham di perusahaan debitor asal, dan kemudian mendapat persetujuan dari pemegang saham debitor asal?

Jika penulis mengandaikan diri sebagai debitor asal, dengan utang Rp 100 (Rp 20 *sustainable* dan Rp 80 *unsustainable*). Dengan skema ini, jika utang dibeli dengan harga Rp 20, maka utang penulis akan berkurang menjadi Rp 19,8 di Bank Mandiri, sementara sisanya diubah menjadi Obligasi Konversi Wajib, yang kemudian dijual lagi oleh *partner* kepada "investor".

Seandainya saja penulis dan "investor" adalah sama, tentunya penulis mendapat pengurangan utang yang lumayan. Jadi, penulis hanya perlu mencari jalan agar dapat menjadi "investor" tanpa diketahui. Untuk itu, penulis hanya perlu modal Rp 0,20 saja.

Dari kenyataan di atas, penulis melihat, PPAK sebagai upaya maksimal yang dilakukan AMC-BPPN dalam mendapatkan pengembalian (*recovery*) atas kredit macetnya.

Ironisnya, PPAK sendiri mencerminkan ketidakberdayaan AMC-BPPN. Ketidakberdayaan yang dimaksud adalah dalam hal, pertama, melakukan penyehatan/restrukturisasi atas kredit macet dalam pengelolaannya. Kedua, mencegah pengembalian kredit macet kepada debitor asal dengan diskon yang besar. Ketiga, menjalankan fungsi penyehatan industri perbankan dengan mengembalikan aset kredit yang sudah sehat kembali kepada perbankan.

Jadi, untuk apa ada AMC-BPPN? Pertanyaan ini memang bukan untuk rekan Syahrial, tetapi untuk kita renungkan bersama sambil mengingat-ingat besarnya biaya yang harus ditanggung rakyat banyak.

(ANDREAS A BUNANTA
mantan pejabat AMC-BPPN)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 4 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : KREDIT INVESTASI / 332.721

Bank Harus Segera Tindak Lanjuti Keppres Restrukturisasi UKM

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menneg Koperasi dan UKM) Alimarwan Hanan meminta perbankan agar segera menindaklanjuti pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) No 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit UKM. "Perbankan sudah bisa menindaklanjutinya, tanpa harus menunggu adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) dari Menneg BUMN atau Menneg Koperasi dan UKM," katanya di Jakarta, Kamis (15/8).

Dalam Keppres 56/2002 Pasal 10 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Keppres diatur Menteri Keuangan (Menkeu), Menneg BUMN, dan Menneg Koperasi dan UKM. Ketentuan pelaksanaan itu disyaratkan paling lambat 30 hari sejak keppres diterbitkan, tanggal 29 Juli 2002, petunjuk pelaksanaan dari ketiga kementerian itu telah diterbitkan.

Menanggapi ketentuan itu, Alimarwan mengatakan, "Batas waktu 30 hari itu akan ditepati. Juklak dan juknis sudah disiapkan. Tetapi, ada yang tidak perlu menunggu juklak dan juknis untuk melaksanakan keppres itu. Perbankan tidak memerlukannya, karena dalam keppres itu sudah jelas perintah pelaksanaannya pada bank-bank."

Pasal 4 (1) Keppres 56/2002 menyebutkan, pelaksanaan restrukturisasi kredit UKM dilakukan oleh bank sesuai ketentuan Bank Indonesia dan anggaran dasar masing-masing bank serta Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dikatakan, juklak dan juknis hanya dibutuhkan bagi kredit UKM yang ada pada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). "Mungkin yang butuh juklak dan juknis yang ada pada DJPLN," ujar Alimarwan. Sebab, berdasarkan Pasal 4 (2) Keppres 56/2002 kredit macet yang pengelolaannya telah diserahkan kepada DJPLN, atas permintaan bank dapat ditarik kembali melalui mekanisme penarikan kembali tanpa harus menyampaikan proposal.

Sementara mengenai pemberian potongan kepada utang pokok (*haircut*), meski Keppres tidak memberi acuan tentang persentasenya, menurut Alimarwan, ketentuannya telah pasti. Yaitu mengacu pada Undang-Undang Program Pembangunan Nasional (UU Propenas) yang menetapkan penyelesaian utang swasta melalui proses restrukturisasi dengan *recovery rate* (tingkat pemulihan) 70 persen.

"UU Propenas sudah menetapkannya, dan itu berlaku keseluruhan. Tetapi, bagi bank yang menghendaki keringanan lebih dari yang ditetapkan Propenas diberi keleluasaan. Tetapi keringanan 30 persen itu batas minimal," tutur Menneg Koperasi dan UKM.

Oleh karena itu, bank yang menjadi milik pemerintah atau dikuasai pemerintah harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) untuk memutuskan pelaksanaan pemberian keringanan kepada UKM. "Sebab, keputusan pelaksanaan restrukturisasi dan pemberian keringanan sepenuhnya kebijakan bank," kata Alimarwan.

Status kredit macet UKM seluruhnya berjumlah Rp [redacted] trilyun, dengan rincian BNI sebesar Rp 1,2 trilyun, Bank Mandiri Rp 7,2 trilyun, BRI Rp 0,7 trilyun, BTN Rp 1,1 trilyun, bank non-BUMN Rp 4,8 trilyun, BPPN Rp 3,1 trilyun, dan DJPLN Rp 3,8 trilyun.

Dalam suatu kesempatan sehari sebelumnya, ekonomi Dr Sjahrir berpendapat, pembentukan lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang independen sudah mendesak untuk melakukan pemeringkatan UKM secara obyektif. Dengan adanya peringkat UKM, akan memudahkan lembaga keuangan untuk menilai kelayakan UKM sehingga dengan mudah dapat menyalurkan pembiayaan. "Tanpa kehadiran lembaga yang bersifat independen ini, sulit bagi UKM memperoleh kredit karena terganjal kolateral," ujarnya.

"Bukan hanya UKM yang mendapatkan manfaat kehadiran *rating agency*, tetapi juga memudahkan perbankan dalam penyaluran kredit," katanya sembari menambahkan, lembaga tersebut bisa melibatkan kalangan universitas sehingga independensinya terjamin.

Sekretaris Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tulus Tambunan setuju dengan pendapat Sjahrir tersebut. "Sebaiknya lembaga yang akan menilai kelayakan usaha UKM itu dilegitimasi oleh pemerintah, sehingga lembaga keuangan sebagai kreditor tidak ragu-ragu menyalurkan kreditnya," tegas dia.

Paling penting, kata Tambunan, lembaga tersebut harus diakui keberadaannya oleh perbankan. (ELY/ETA)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : MINGGU / 23 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 21 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : MANURUNG, Adler Haymans
Subjek : INVESTASI / 332.6

Sekali Lagi Investasi pada Valuta Asing

DALAM dua minggu ini pertanyaan yang masuk mengenai investasi valuta asing cukup menarik. Pertanyaannya, apakah bisa melakukan transaksi dengan bank yang menggunakan dan investasinya dalam bentuk deposito atau tabungan dalam mata uang asing atau dalam bentuk *bank note*. Bank mana yang memberikan transaksi tersebut juga merupakan pertanyaan para pembaca kolom investasi ini. Penulis akan menguraikannya secara ringkas dalam tulisan ini.

Dalam melakukan investasi dalam bentuk valuta asing, maka ada dua faktor yang memberikan keuntungan kepada investor yaitu *capital gain* dan tingkat bunga.

Capital gain diperoleh atas gejolak nilai tukar valuta asing tersebut terhadap mata uang domestik. Gejolak nilai tukar valuta asing tersebut tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhi nilai tukar tersebut yaitu inflasi, investasi asing dan kebutuhan lokal atas valuta asing maupun kebutuhan asing yang mempunyai transaksi lokal serta situasi politik dari negara yang bersangkutan.

Investor spekulan lebih mementingkan *capital gain* dibandingkan tingkat bunga yang diperoleh dari valuta asing tersebut. Biasanya investor spekulan mendapatkan atau mengharapkan *capital gain* lebih besar dari *capital gain* dan tingkat bunga dimana valuta asing tersebut tidak ditransaksikan. Tetapi, risiko yang sangat besar juga harus ditolerir dari investor spekulan. Pada sisi lain investor yang hanya untuk berjaga-jaga untuk kebutuhan seperlunya misalnya, ibu-ibu yang mempunyai anak sekolah di luar negara tempat tinggalnya tidak memikirkan *capital gain* tetapi tingkat bunga saja. Tingkat bunga valuta asing merupakan faktor penting bagi investor dalam menghitung tingkat pengembalian investasi dalam valuta asing tersebut. Akibatnya, *capital gain* yang diperoleh investor akan jauh berbeda dari investor spekulan. Investor yang sedikit di bawah spekulan atau investor yang moderat, maka tingkat bunga dan sedikit dari *capital gain* merupakan ekspektasi atas investasinya. Investor dapat memperhatikan diri masing-masing untuk melakukan investasi dalam valuta asing.

Untuk investasi dalam valuta asing ada tiga jenis investasi yang dilakukan yaitu investasi pada *bank note*, deposito dalam valuta asing, dan tabungan dalam valuta asing. Untuk *bank note*, investor hanya mendapatkan *capital gain* dan tidak ada tingkat bunga karena *bank note* tersebut sama dengan valuta asing itu sendiri misalnya, rupiah, dollar AS, dollar Singapura dan sebagainya.

Bila Anda memegang mata uang tersebut dan menyimpannya di bawah bantal, maka yang diharapkan adalah kapital atas selisih pembelian dengan penjualan *bank note* tersebut. Bila nilai tukarnya naik maka diperoleh kapital dan bila turun diperoleh kerugian.

Bila investor mempunyai valuta asing, lebih baik disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan karena dengan disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan maka investor akan memperoleh tingkat bunga atas investasi valuta asing tersebut. Tingkat bunga deposito valuta asing lebih tinggi dari tingkat bunga tabungan valuta asing. Bila valuta asing investor dalam bentuk tabungan, maka kerugian dari investor dapat diminimalkan dan lebih baik daripada *bank note*. Misalkan nilai tukar valuta asing yang dipegang melemah (turun) maka investor dapat dengan cepat menjual pada harga lebih rendah sedikit dari kemarin sehingga kerugian sedikit lebih kecil. Sedangkan valuta asing yang disimpan dalam bentuk deposito tidak bisa diapa-apakan sampai jatuh tempo, sehingga risiko semakin besar dan pada saat jatuh tempo depositonya harga turun sekali maka kerugian sangat besar.

◆◆◆

PIKIRAN investor akan lebih tenang saat melakukan investasi dalam valuta asing bentuk deposito bila nilai tukar valuta asing tidak sangat bergejolak, tetapi pada level sama dengan tingkat bunga depositonya. Artinya, investor tidak mengalami kerugian karena kerugian atas fluktuasi nilai tukar valuta asing dapat dikompensasikan dengan tingkat bunga yang diperolehnya.

Investasi dalam bentuk tabungan valuta asing lebih menarik dibandingkan deposito valuta asing. Argumentasinya, investor valuta asing tidak perlu duduk di depan layar terminal komputer untuk memperhatikan gejolak harga valuta asing tersebut seperti pada saham. Investor hanya dapat memperhatikan dalam waktu empat atau lima jam atau hari esoknya.

Investor tidak usah terlalu khawatir bila sering berhenti atau menabung kembali karena hal itu sudah merupakan pekerjaan *teller* bank yang bersangkutan. Persoalan yang harus diselesaikan yaitu bila investor menarik tabungan valuta asingnya akan dikenakan biaya, maka investor harus melakukan perhitungan yang matang sekali. Hal ini terjadi beberapa tahun lalu yaitu bila melakukan penarikan atas tabungan valuta asing maka dikenakan biaya yang besarnya sesuai peraturan bank bersangkutan. Saat ini tidak banyak bank yang melakukan pengurangan atau mengenakan biaya atas penarikan tabungan valuta asing.

◆◆◆

DALAM melakukan transaksi jual beli valuta asing, investor dapat melakukan melalui perusahaan *money changer* atau bank yang bersangkutan. Biasanya, nilai tukar di bank sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai tukar di perusahaan *money changer*, karena pendapatan perusahaan tersebut atas selisih dari nilai tukar tersebut, sedangkan perbankan hanya merupakan produk tambahan terhadap bank yang bersangkutan.

Masing-masing mempunyai risiko yang masing-masing investor dapat meminimumkannya agar risiko tidak lebih besar. Oleh karenanya, investor harus mempertimbangkan dengan matang-matang dalam melakukan penukaran dalam bentuk mata uang domestik ke valuta asing atau dari valuta asing ke uang domestik.

Selanjutnya, bila investor memiliki rupiah dan ingin melakukan investasi dalam bentuk valuta asing, maka investor dapat melakukan investasi kepada valuta asing dollar AS, dollar Hongkong, yen, dan poundsterling karena memberikan tingkat pengembalian hampir sama serta risiko lebih kecil.

Hitungan penulis menggunakan data Januari 1997 sampai dengan 31 Mei 2002. Oleh karenanya, investor jangan hanya melakukan investasi pada satu valuta asing saja. Bila investor mempunyai dollar AS, maka investor dapat melakukan investasi pada valuta asing selain rupiah adalah dollar Singapura, franc, dollar Australia, dan mark Jerman karena tingkat pengembalian yang diperoleh juga tinggi dengan risiko yang hampir sama. Periode perhitungan adalah seperti yang disebutkan sebelumnya.

Risiko investasi ini tetap pada investor oleh karenanya investor harus tetap hati-hati. Selamat berinvestasi pada valuta asing. ◆

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 20 / DESEMBER / 2002
Hlm/Kolom : 9 / 1 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : IRWAN JULIANTO
No_Klass/Subjek : DEMONSTRASI ANTI ABBOSI / 332.42

AS Kembali Puritan

GANTI pemerintahan ganti kebijakan. Itulah yang terjadi di Amerika Serikat. Setelah era Clinton dari Partai Demokrat berlalu digantikan administrasi Presiden George W Bush dari Partai Republik, kebijakan soal seks–khususnya abstinensia bagi kaum remaja yang belum menikah– kini jadi urusan negara.

MAJALAH *Newsweek* edisi 9 Desember 2002 menurunkan laporan khusus bahwa Bush menginginkan dukungan dunia bagi globalisasi nilai-nilai keluarga Amerika, atau paling tidak nilai-nilai keluarga Bush. Ketika menjadi calon presiden ia mengkampanyekan pandangannya yang antiaborsi. Kini sebagai presiden, ia ingin mengesankan bahwa ia adalah seorang pemimpin moral, bukan hanya bagi bangsa Amerika tetapi juga untuk dunia. Tahun depan Bush berniat mendorong kampanye abstinensia secara nasional dengan anggaran sebesar 135 juta dollar—meningkat dari hanya 60 juta dollar untuk tahun 1998.

Tak heran jika acara Konferensi Kependudukan Asia-Pasifik (APPC) V di Bangkok tanggal 10-17 Desember lalu berlangsung dengan alot karena delegasi AS ingin memaksakan agar sikap pemerintahnya yang antiaborsi dan tak setuju seks premarital di kalangan remaja didukung negara-negara peserta lain. Ternyata delegasi AS kecele. Sikap mereka meminta revisi istilah "hak-hak reproduksi" dan "aborsi tak aman" yang telah dibakukan di Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Cairo tahun 1994 ditolak oleh semua delegasi. Nota tekanan yang dikirim Kedutaan Besar AS ke departemen luar negeri berbagai negara termasuk Indonesia ji tidak mempan.

Untunglah delegasi Indonesia masih menyelamatkan muka delegasi AS yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri-nya Arthur E Dewey. Berkat mediasi yang dilakukan Dr Siswanto Agoes Wilopo, Deputi Kepala BKKBN bidang KB dan Kesehatan Reproduksi yang terpilih menjadi Rapporteur General, akhirnya delegasi AS sepakat menempatkan catatan kaki reservasinya untuk tidak mereafirmasi Rencana Aksi APPC V hanya pada lampiran dokumen.

Sikap delegasi AS melunak setelah mereka tahu dalam voting yang diikuti 35 negara, hanya AS yang menyatakan tidak setuju terhadap rumusan paragraf F (hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi) dan paragraf G (kesehatan reproduksi remaja), 32 negara lain setuju, sedang dua negara abstain yaitu Sri Lanka dan Nepal. Kabarnya dua negara kecil ini amat membutuhkan dukungan AS menghadapi ancaman negara tetangga mereka yang jauh lebih besar, India.

Menurut Siswanto, sebenarnya Ketua delegasi AS, Arthur E Dewey lebih moderat dibanding anak buahnya sendiri, Louise Oliver yang mengurus masalah kebijakan kependudukan internasional. "Dewey masih mau memahami bahwa upaya membantu menekan korban aborsi tak aman itu adalah upaya kesehatan masyarakat, sementara Oliver melihat itu sebagai masalah hukum," katanya.

Sikap pemerintah AS yang *Pro-Life* bakal mempersulit posisi lembaga multilateral seperti UNFPA (Dana PBB Untuk Kependudukan) yang bakal tak memperoleh kucuran dana lagi dari AS. AS merasa dana yang disumbangkannya ke UNFPA tak bisa dikontrolnya secara langsung jika oleh UNFPA diberikan kepada suatu negara yang pro-aborsi tak sukarela. AS juga menyetop bantuannya untuk LSM internasional bidang KB seperti IPPF (Federasi Keluarga Berencana Internasional) yang dinilai *Pro-Choice*. Tak heran jika Dijen IPPF Dr Steven W Sinding amat pedas mengecam Pemerintah AS di APPC V, yang ditudingnya telah membalikkan komitmen global yang didukungnya di ICPD.

"Di konferensi ini satu delegasi secara terus-menerus menyatakan bahwa Program Aksi ICPD mempromosikan aborsi. Padahal, ini sama sekali tidak benar. Puluhan negara di mana aborsi ilegal mendukung Program Aksi ICPD karena mereka memahami bahwa istilah 'pelayanan kesehatan reproduksi' dan 'hak-hak reproduksi' termasuk aborsi hanya berlaku untuk di negara-negara yang menganggap aborsi legal," kata Sinding.

Pendapat senada dikemukakan oleh Direktur Eksekutif UNFPA Thoraya Ahmed Obaid asal Arab Saudi, bahwa setiap negara memiliki hak dan kebebasan untuk membuat undang-undang berkaitan dengan semua aspek kesehatan reproduksi, termasuk aborsi.

Dari segi bahasa hukum, pandangan delegasi AS memang tak bisa sama sekali disalahkan. Dewey dalam sanggahannya pada pertemuan tingkat menteri APPC V hari Senin (16/12) mengutip pendapat Presiden Bush bahwa AS mendukung kesakralan kehidupan dari konsepsi hingga kematian.

Masyarakat AS dikatakan Bush memiliki kewajiban untuk mempertahankan mereka yang paling rentan dan lemah, yang tak sempurna, dan bahkan yang tak dikehendaki. Bayi-bayi yang digugurkan harus diberi kesempatan untuk hidup dan dilindungi oleh hukum.

Tentang *under-age sex*, sikap Pemerintah AS yang mengkampanyekan hanya program abstinensia juga dikecam oleh Sinding.

"Kebijakan itu sama sekali keliru. ICPD mendukung program yang akrab dengan kaum remaja untuk memahami konsekuensi seks tak aman dan mendorong perilaku bertanggung jawab, termasuk abstinensia. Tetapi kita semua tahu bahwa banyak kaum muda tetap akan melakukan hubungan seks, kendati kita orang dewasa suka atau tidak," ujarnya.

Sinding sendiri sebagai warga AS menyatakan kecewa dengan pemerintahnya sekarang yang dinilainya amat puritan dan konservatif. Ia akan berjuang mengubah lagi agenda AS untuk kependudukan dan soal seks jika pemerintahan berganti lagi ke kubu Partai Demokrat. (IRWAN JULIANTO)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 6 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 28 / 1-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : REKSA DANA / 332.1

Ketika Aset Reksa Dana Meningkat Pesat

REKSA dana mencatat peningkatan nilai aset kelolaan yang luar biasa. Bayangkan saja...! Di akhir tahun 2001, nilai aset yang dikelola oleh para pengelola dana investasi (*fund manager*) yang ada di Indonesia, baru mencapai Rp 8 trilyun. Akan tetapi, enam bulan kemudian, yakni Juni 2002, nilai asetnya sudah menggelembung menjadi Rp 17,8 trilyun. Artinya, terjadi peningkatan dua kali lipat lebih. Apa yang terjadi pada industri reksa dana?

ADA beberapa faktor yang menyebabkan *industri ini berkembang* cepat, setidaknya dalam enam bulan terakhir. Potensi dana-dana investasi di masyarakat masih cukup besar. Bandingkan dengan dana pihak ketiga (tabungan, giro, dan deposito) di perbankan nasional yang mencapai Rp 787 trilyun. Tentu masih sangat besar potensi dana yang bisa direbut industri reksa dana dari perbankan. Jika aset (dana masyarakat) yang dikelola reksa dana dibandingkan dengan dana masyarakat di perbankan itu, tentu baru sekitar dua persen saja.

"Di India, perbandingan itu sudah sekitar 30 persen," ujar Naresh Krishnan, Direktur Penjualan dan pemasaran Mutual Fund Manulife Financial.

Kenyataan itu tentu saja mendorong para *fund manager* untuk terus berinovasi, menciptakan produk yang menarik dan kompetitif, meningkatkan pelayanan dan nilai investasi masyarakat yang dikelolanya. Memang, jenis reksa dana (*fund*) makin beragam di pasar. Keberagaman *fund* itu, jelas menambah pilihan investasi bagi investor. Jika di awal tahun baru sebanyak 108 jenis *fund*, kini sudah menjadi 114.

Selain itu, pola distribusi juga semakin bergeser. Semula *fund manager* terkesan hanya menggarap pasar Jakarta, kini mereka sudah mulai merambah pasar di luar Jakarta. Bahkan, ada *fund manager*, seperti Manulife, yang berani menggarap daerah konflik sekalipun, seperti Aceh.

Inilah salah satu bukti bahwa investasi tidak mengenal batas-batas. Daerah boleh saja bergolak, tetapi masyarakat *tentu akan terus* menyelamatkan dana-dananya. Karena itu, arus investasi akan terus bergerak mengalir masuk ke kantung-kantung investasi yang dapat memberikan peningkatan nilai.

Kalau dulu hanya *fund manager* sendiri yang "banting tulang" memasarkan produknya, kini tidak lagi. Bank-bank juga mulai menawarkan produk alternatif investasi kepada nasabahnya, dengan menawarkan produk reksa dana. Ketimbang mereka (nasabah) hengkang, tentu lebih baik menyediakan instrumen yang bisa mereka gunakan untuk mendiversifikasikan penempatan dananya sehingga tetap dalam genggaman bank. Nama-nama seperti Standard Chartered Bank, HSBC Bank, Commonwealth Bank, kini sudah tidak asing lagi dengan produk reksa dana yang mereka tawarkan.

Dengan upaya pemasaran yang terus bergerak dinamis itu, tak heran jika jumlah pemodal yang menanamkan dananya pada reksa dana juga membengkak. Dalam dua bulan (Mei-Juni) saja, misalnya, ada sekitar 5.000 investor baru yang terjaring. Kini tercatat, 69.749 pemodal. Padahal, di akhir tahun 2001, jumlah pemodal baru sekitar 51.723.

Selain faktor internal itu, faktor eksternal juga ikut menunjang. Di tengah upaya industri reksa dana berbenah, kondisi pasar pun berubah. Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) misalnya, cenderung terus menurun. Jika di awal tahun tingkat suku bunga SBI masih bertengger di tingkat 17 persen, kini sudah turun dua persen di kisaran 15 persen. Akibatnya, tingkat suku bunga deposito yang dapat dinikmati para deposan juga sudah mulai berkurang, setidaknya dua persen per tahun.

Akibat dari kondisi itu, menurut Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) Adler Haymans Manurung, masyarakat deposan mulai mencari alternatif investasi. "Investor itu kan selalu cenderung mencari *return* yang tinggi. Kebetulan, secara empiris tingkat pengembalian (*return*) reksa dana umumnya lebih tinggi dari deposito. Meski tanpa penelitian, saya yakin sebagian dana masyarakat yang direbut reksa dana adalah dana-dana deposan. Masalahnya, reksa dana belum dikenal luas oleh masyarakat seperti mereka sudah akrab dengan tabungan atau deposito. Akibatnya, perkembangan reksa dana bisa dikatakan masih lamban," papar Adler.

Oleh karena itu, menurut Naresh Krishnan, masyarakat pengelola reksa dana ini harus memiliki komitmen untuk mengembangkan pasar reksa dana. "Ya, masyarakat perlu edukasi terus-menerus," katanya.

JIKA dilihat dari jumlah dana yang dikelola reksa dana sekitar Rp 17,8 trilyun itu, reksa dana jenis berpendapatan tetap (*fixed income*) memang yang mencatat perkembangan lebih agresif. Aset yang dikelola reksa dana *fixed income* sendiri sudah menguasai sekitar Rp 12,65 trilyun. Sementara reksa dana saham Rp 337,7 milyar, reksa dana campuran Rp 792,4 milyar, dan reksa dana pasar uang dengan aset kelolaan senilai Rp 3,87 trilyun. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa reksa dana pendapatan tetap menguasai 70,7 persen.

Mengapa reksa dana *fixed income* lebih mendominasi pasar?

"Rata-rata pemodal kita kan belum *risk taker*, atau tidak mau memikul terlalu besar risiko investasi. Masih banyak orang yang enggan ke reksa dana saham karena secara alamiah investasi saham memang berisiko tinggi dibanding lainnya karena fluktuasinya yang cukup tinggi. Sementara di sisi lain, suku bunga perbankan terus menurun sehingga mereka mencari alternatif lain yang risiko rendah, ya reksa dana pendapatan tetap," ujar Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia Michael T Tjoajadi.

Menurut dia, dengan investasi yang kecil, kalau melalui reksa dana, masyarakat bisa berinvestasi ke obligasi yang berpendapatan tetap. Kalau mau membeli langsung obligasi, mereka membutuhkan dana yang besar karena penjualan obligasi itu umumnya memang dalam jumlah besar. Dengan demikian, investor kecil praktis tidak mungkin berinvestasi di obligasi. "Inilah karakteristik reksa dana, sebab dana masyarakat dikumpulkan dari sejumlah investor sehingga tekumpul labih besar, lalu diinvestasikan oleh manajer investasi," ujarnya.

Hal itu dibenarkan Naresh Krishnan. Menurut dia, dengan dana nasabah Rp 100.000 pun tetap dilayani. "Meski dananya kecil, perlakuan kita sama dengan investor yang dananya besar. Mereka juga diberi informasi yang sama," katanya.

Dengan strategi ritel seperti itu pula yang mengantarkan reksa dana Manulife yang selalu diawali dengan kata "Phinisi" cukup mampu merebut dana-dana masyarakat. Manulife pula yang pertama kali membentuk *fund* yang menanamkan dananya pada obligasi pemerintah, melalui Phinisi Dana Tetap Pemerintah. "Kami juga yang pertama kali menempatkan dananya 100 persen ke obligasi pemerintah," ujar Naresh.

Naresh bangga menceritakan pengalaman perusahaannya menggarap investor ritel di daerah. "Bayangkan, di Banda Aceh yang begitu tidak kondusif keamanannya, banyak orang mau memisahkan diri dari Indonesia, kami bisa menjual produk. Di Jambi, kami

Perpustakaan Unikom
hlm. 176

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

dapat menghimpun dana Rp 3 milyar, juga di Pontianak Rp 3 milyar. Kami melakukan penetrasi pasar di daerah. Tapi harus punya komitmen edukasi masyarakat terus-menerus. Sebab, potensi mereka cukup besar. Di Padang, investor Rp 100.000 juga kami layani dan kami beri perlakuan yang sama dengan investor besar," katanya.

Meski demikian, Naresh menyatakan tetap ketat dalam memasarkan produknya. Semua agen harus mendapatkan lisensi dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). "Sekitar 50 persen agen berlisensi adalah agen Manulife," ujarnya.

◆◆◆

MENURUT pandangan Rizka Baely, Country Manager Indonesia Citigroup Asset Management yang meluncurkan CitiReksaDana, perkembangan reksa dana saat ini sesuai evolusi kesadaran masyarakat mengenai diversifikasi investasi dan risiko. Jika dilihat, katanya, sebelum muncul reksa dana, masyarakat cuma mengenal produk bank. Setelah reksa dana mulai diperkenalkan di tahun 1996/1997, masyarakat sudah mencoba, namun investasinya masih di reksa dana yang dekat-dekat dengan produk bank, seperti reksa dana yang menaruh dananya pada deposito berjangka, atau SBI.

Akan tetapi, kata dia lagi, masyarakat kini melihat kalau sekadar deposito, sudah tidak memadai lagi. Itu artinya mereka butuh investasi yang lain. Makanya, mereka masuk ke reksa dana yang menaruh dananya pada obligasi yang berpendapatan tetap. Seiring peningkatan kesadaran masyarakat nanti, mereka akan berlomba-lomba juga memasuki reksa dana saham yang risikonya lebih tinggi.

Meskipun demikian, Rizka menyatakan, faktor edukasi masyarakat sangat penting. Citigroup Asset Management sendiri, katanya, menempuh dua pola pendidikan, yaitu pendekatan kepada institusi (dana-dana pensiun) dan ritel atau individual. Bagi pengelola dana-dana pensiun, diajak ke luar negeri untuk memperoleh pendidikan mengenai cara investasi, mengenalkan profil risiko. "Bukan kami yang mengajar atau ceramah, tetapi ceramah diberikan oleh konsultan dana pensiun," ujarnya.

Sementara, edukasi bagi investor ritel dilakukan melalui bank yang telah diajak kerja sama, yakni Citibank dan Standard Chatered Bank dengan menggelar kegiatan konsumen yang sifatnya edukasional sehingga nasabah bisa mengerti apa dan bagaimana investasi, khususnya reksa dana. "Soalnya, 75 persen pemasaran kita itu melalui bank," ungkapnya.

Di tengah lompatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan pengelola reksa dana, banyak faktor yang perlu dicermati. Misalnya, pelayanan yang tetap diutamakan, terutama soal keterbukaan informasi kepada nasabah. Misalnya, jika nilai aktiva bersih turun, masyarakat perlu diberi penjelasan agar mereka tidak kecewa dan dapat memahami hal tersebut. Terutama bagi nasabah kecil yang sesungguhnya memang harus menjadi target reksa dana. (DIS)

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

PERINGKAT 10 BESAR REKSA DANA

(Berdasarkan Jenis dan Nilai Aset)

JENIS	Nilai Aset (Rp juta)	Pemodal (pihak)
RD Pendapatan Tetap		
1. Prima Reksa	7.874.679	11.142
2. CitiReksaDana Rupiah	1.353.906	4.275
3. Schroder Dana Mantap	867.696	2.097
4. BNI Dana Berbunga Dua	561.775	943
5. Dana Tetap Instan	436.633	47
6. Danareksa Melati Dollar AS	225.775	266
7. Phinisi Dana Tetap Pemerintah	247.570	3.180
8. Nikko Obligasi Nusantara	150.410	193
9. Trimegah Dana Tetap	146.791	901
10. Si DanaObligasi	137.788	161
Total 48 jenis RD Pendapatan Tetap	12.330.274	29.337
RD Saham		
1. Schroder Dana Prestasi Plus	53.261	303
2. Panin Dana Maksima	36.382	636
3. Bahana Dana Prima	30.838	686
4. CitiReksaDana Ekuitas	30.537	295
5. Phinisi Dana Saham	28.070	754
6. BNI Reksa Dana Berkembang	26.911	1.559
7. ABN-AMRO Ind Dana Saham	24.211	617
8. BNI Reksa Dana Berkembang	22.371	171
9. GTF Agresif	16.031	237
10. BIG Nusantara	15.932	252
Total 22 RD Saham	351.406	7.243

JENIS	Nilai Aset (Rp juta)	Pemodal (pihak)
RD Campuran		
1. DUIT	214.597	7.683
2. Schroder Dana Terpadu	128.673	705
3. Schroder Dana Prestasi	98.882	578
4. Bahana Dana Selaras	68.415	433
5. Dana Berganda	55.968	119
6. Garuda Satu	48.261	833
7. Bahana Dana Infrastruktur	38.754	528
8. Bahana Dana Sejahtera	27.231	319
9. Phinisi Dana Campuran	22.439	576
10. BIG Nusantara	19.224	274
Total 28 RD Campuran	829.351	14.362
RD Pasar Uang		
1. Investa Emas	1.935.635	9.030
2. Phinisi Dana Kas	1.126.283	5.177
3. Danamas Rupiah	222.984	671
4. Commonwealth D Premium	89.146	293
5. Nikko Uang Likuid	73.933	280
6. Danareksa Seruni Rupiah	62.368	1.272
7. MR CASH	19.181	18
8. Niaga Pasar Uang	18.600	125
9. ABN-AMRO Ind Dana Rupiah	17.914	283
10. Buana 88 Rupiah	17.186	4
Total 13 RD Pasar Uang	3.604.381	17.323

Sumber: Bapepam dan Pengelola Reksa Dana



Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 8 / MARET / 2003 /
Hlm/Kolom : 1 - 11 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ / 4-6
Penulis :
No_Klass/Subjek : EKONOMI / 337

Gejala Buruk Ekonomi di Tiga Negara

LOS ANGELES, JUMAT — Keadaan ekonomi tiga negara terkuat di dunia sudah mengalami kelesuan. Perkembangan terbaru memperlihatkan, gejala lebih buruk semakin mencuat. Isu Irak termasuk satu faktor terbesar penyebab semua itu.

Tiga negara dimaksud adalah Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Jerman yang menguasai lebih dari 50 persen perekonomian dunia. Itu merupakan berita buruk karena akan menyulitkan pasaran ekspor negara berkembang ketiga negara itu.

Selain itu, kondisi ini juga menyulitkan pertumbuhan ekonomi. Padahal, hal tersebut penting untuk mengatasi kemiskinan secara perlahan di negara berkembang.

Di Los Angeles, Kamis (6/3) atau Jumat pagi WIB, anggota Dewan Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve) Edward Gramlich mengatakan, "Dampak rencana serangan ke Irak terhadap perekonomian AS sudah mustahil untuk diramalkan *(imponderable)*."

Teori ekonomi standar mempercayai bahwa perang memberikan stimulus terhadap perekonomian, terutama sektor konstruksi. Akan tetapi, kata Gramlich dasar pemikiran teori ekonomi standar itu tidak memperhitungkan kompleksitas.

Menurut Gramlich, isu Irak justru mengandung kompleksitas. Isu Irak terkait erat dengan kenaikan harga minyak. Pekan lalu, harga minyak mentah sudah sempat menyentuh harga 40 dollar AS per barrel atau tertinggi dalam 12 tahun terakhir.

Kini harga minyak turun ke level 37 dollar AS per barrel, tetapi masih jauh lebih tinggi dari kisaran 28 dollar AS per barrel yang dianggap aman oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Kenaikan harga minyak sangat mudah meningkatkan biaya produksi dan menyulut inflasi. Itu sangat menakutkan bagi perekonomian negara maju.

The Brookings Institution memperlihatkan bukti empiris. Kenaikan harga minyak tahun 1970-an, terulang lagi tahun 1990-an, telah membuat pejabat bank sentral berbagai negara mengetatkan peredaran uang karena tekanan inflasi.

Hal itu dilakukan dengan menaikkan suku bunga. Namun, tindakan tersebut semakin berdampak negatif karena menurunkan gairah investasi.

Gramlich menambahkan, isu Irak juga meruntuhkan kepercayaan investor. Padahal, investor adalah pemasok permodalan untuk bisnis.

"Sekarang, tak seorang pun tahu pasti apakah perang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian," tutur Gramlich di forum National Association for Business Economics, Los Angeles.

Pada kesempatan itu, Gramlich juga mengatakan bahwa Pemerintah AS lebih menekankan kestabilan harga-harga dengan tingkat inflasi sekitar 1,7 persen. Inflasi stabil tidak akan mendorong kenaikan suku bunga. Itu penting karena Pemerintah AS kini sedang memiliki utang besar sekitar 6 trilyun dollar AS.

Jika suku bunga naik akibat tekanan inflasi, hal itu akan menambah beban pembayaran utang Pemerintah AS atau menambah beban anggaran Pemerintah AS yang diperkirakan akan mencatatkan rekor defisit baru sekitar 430 milyar dollar AS tahun ini. Indikator lain di AS menunjukkan, indeks saham Dow Jones sudah anjlok 8 persen tahun 2003.

Jerman

Di Frankfurt laporan Bundesbank (Bank Sentral Jerman) mengatakan, perekonomian Jerman yang lesu kemungkinan belum juga akan berubah menjadi baik dalam waktu dekat. Tingkat pengangguran juga diperkirakan akan meningkat.

Kelemahan yang sudah kronis sekarang ini, demikian laporan Bundesbank, akan berlangsung lebih lama jika pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah struktural.

Ekonomi Jerman terbesar di Eropa—ketiga di dunia—namun penampilannya adalah terburuk di Zona Euro (terdiri dari 11 negara Uni Eropa). "Ekonomi Jerman menderita karena krisis kepercayaan," demikian analisis Bundesbank. Secara implisit, Bundesbank menyinggung keengganan pebisnis untuk merekrut tenaga baru dan melakukan ekspansi bisnis karena ketidakpastian ekonomi global. Sebagai negara besar di dalam ekonomi, Jerman sangat bergantung pada perekonomian global.

"Setelah dua tahun terjerat stagnansi (kemandekan), pada tahun 2003 ini Jerman tidak bisa mengharapkan pertumbuhan besar, tetapi marjinal."

Tahun lalu, ekonomi Jerman hanya tumbuh 0,2 persen dan pengangguran mencapai 11,3 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Kanselir Jerman Gerhard Schroeder pada 14 Maret 2003 akan mengumumkan program reformasi, yang ditujukan untuk menggerakkan perekonomian.

Jepang

Jepang, raksasa ekonomi kedua di dunia, juga memperlihatkan keadaan lebih buruk. Sejak tahun 1990-an, ekonomi Jepang mandek.

Kabar terbaru dari Tokyo, indeks Nikkei kini mencapai angka yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Indeks Nikkei ditutup pada level 8.144 poin, kemarin, atau jatuh 2,7 persen dibandingkan dengan indeks sehari sebelumnya.

Hal itu merupakan kombinasi dari kekhawatiran akan serangan Irak dan skandal korporasi yang saat ini juga melanda Jepang. Nikko Salomon Smith Barney (milik Citigroups) dilaporkan akan didenda karena memanipulasi harga-harga saham. Hal itu semakin merusak kepercayaan investor Jepang karena memicu keraguan soal integritas perusahaan pialang.

Hal lain adalah tensi yang meningkat di Semenanjung Korea sehubungan dengan isu krisis nuklir Korea Utara.

Jepang, menurut IMA Asia yang berbasis di Sydney, Australia, juga akan sangat terpukul atas kenaikan harga minyak karena benar-benar bergantung pada impor minyak.

(AFP/AP/MON)